

# LAPORAN

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



DALAM RANGKA PERTEMUAN DENGAN  
COMMITTEE REPRESENTING  
PYIDAUNGSU HLUTTAW (CRPH)

VIRTUAL MEETING | 8 FEBUARI 2022



# DAFTAR ISI

- **PENDAHULUAN**

- **LATAR BELAKANG**
- **FUNGSI BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) DALAM DIPLOMASI PARLEMEN**
- **ISU MYANMAR DALAM DIPLOMASI PARLEMEN INDONESIA**
- **DASAR HUKUM**
- **MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**
- **MISI DELEGASI**
- **SUSUNAN DELEGASI**
- **PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS**

- **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- **AGENDA KEGIATAN**
- **JALANNYA PELAKSANAAN KEGIATAN**

- **KESIMPULAN DAN SARAN**

- **KESIMPULAN**
- **SARAN**

- **PENUTUP**

- **UCAPAN TERIMA KASIH**
- **LAMPIRAN**







**LAPORAN**  
**BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)**  
**DALAM RANGKA PERTEMUAN VIRTUAL DENGAN**  
**COMMITTEE REPRESENTING PYIDAUNGSU HLUTTAW (CRPH)**

Tangerang Selatan - Banten, 7 - 9 Februari 2022

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sekretaris Jenderal *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA), Mrs. Nguyen Tuong Van, mengirim Surat Nomor 107/AIPA/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, perihal penyampaian Surat tertanggal 5 November 2021 dari *Chairman of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw* (CRPH), Mr. Aung Kyi Nyunt, perihal permintaan melakukan "*Parliament-2-Parliament Meeting*" dengan DPR RI. Sekjen AIPA juga menginformasikan bahwa Surat senada juga dikirimkan kepada masing-masing Parlemen Anggota AIPA.

Surat tersebut kemudian dibahas oleh Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dalam rapatnya pada tanggal 3 Januari 2022 dan memutuskan untuk menerima permintaan CRPH tersebut dalam sebuah pertemuan secara virtual.

Sekretariat BKSAP yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan BKSAP tersebut dengan mengirimkan jawaban Surat Nomor O/5682/KS.01.01/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal AIPA perihal persetujuan BKSAP untuk menerima secara virtual pertemuan dengan CRPH guna membahas situasi terkini di Myanmar dan meminta AIPA agar menyampaikan konfirmasi tersebut.

Dengan demikian komunikasi antara BKSAP dengan CRPH tidak dilakukan secara langsung namun melalui Sekretariat AIPA. Demikian pula, pertemuan tersebut lebih merupakan inisiatif CRPH, sedangkan BKSAP merupakan inisiator yang menanggapi inisiatif CRPH tersebut.

## **B. Fungsi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dalam Diplomasi Parlemen**

Keberadaan lembaga parlemen memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain menjalankan tiga fungsi utama yaitu pengawasan, penganggaran, dan legislasi, parlemen juga memiliki tugas melakukan diplomasi. Mandat tersebut tertuang dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>1</sup>, atau biasa disebut UU MD3, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar, diplomasi yang dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan bagian dari pendekatan Pemerintah Indonesia yang menjalankan diplomasi ganda (*multi-track diplomacy*). Pemerintah dan parlemen bersama-sama menjalankan diplomasi untuk memperkuat peran Indonesia di kancah regional dan global dalam rangka meningkatkan kepentingan bangsa.

Sejalan dengan UU MD3 tersebut, Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menegaskan bahwa tiga fungsi DPR RI (pengawasan, penganggaran, legislasi) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah beberapa kali diubah yaitu : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) merupakan Alat Kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap dan secara spesifik diberi mandat untuk menjalankan diplomasi parlemen. Sesuai dengan Pasal 116 UU MD3 dan Pasal 82 Tata Tertib DPRRI Tahun 2020, tugas BKSAP antara lain: membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain. BKSAP menjadi ujung tombak diplomasi parlemen dan menjadi pintu masuk bagi penguatan hubungan bilateral, regional, dan internasional antar parlemen.

Saat ini, BKSAP menjalankan diplomasi yang komprehensif mencakup bilateral, regional, dan internasional. Secara bilateral, BKSAP menjalin relasi yang sangat kuat dengan berbagai negara sahabat untuk bertukar informasi, mendiskusikan masalah bersama, serta membangun hubungan yang lebih kuat dalam berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi, sosial, keamanan, lingkungan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, DPR RI telah membentuk Grup-grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan 102 negara sahabat yang dikoordinasikan oleh BKSAP sesuai dengan Pasal 76 huruf e Tata Tertib DPR RI.

Sebagai lembaga representasi, DPR RI melalui BKSAP, juga melakukan penguatan diplomasi antar parlemen di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Selama ini, BKSAP telah dan masih menjembatani dialog antara aktor-aktor politik untuk menyelesaikan konflik dan memajukan kerjasama, khususnya di antara anggota parlemen.

### **C. Isu Myanmar Dalam Diplomasi Parlemen Indonesia**

BKSAP DPR RI telah memfokuskan kegiatannya untuk menyoroti agenda kemanusiaan dan demokrasi di kawasan Asia Tenggara selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, khususnya dalam merespon sejumlah krisis yang muncul dari negara tetangga di ASEAN, yaitu Myanmar.

Keperhatian DPR RI terhadap isu kemanusiaan antara lain dalam bentuk keterlibatan DPR RI di berbagai organisasi internasional dalam mengadopsi *outcome document* berupa resolusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya, seperti *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*. Upaya terkini yaitu keterlibatan DPR RI dalam merespon krisis politik yang sedang berlangsung di Myanmar, pasca kudeta junta militer 1 Februari 2021. BKSAP DPR RI telah secara konsisten mendorong pelaksanaan penuh *Five-Point Consensus* sebagaimana telah disepakati oleh Pimpinan Tinggi ASEAN pada 2021.

Pada Sidang Umum ke-41 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* tahun 2021, BKSAP DPR RI mengajukan usulan rancangan resolusi kepada Komite Politik untuk merespon krisis kemanusiaan dan krisis demokrasi yang terjadi di Myanmar. Namun demikian, usulan rancangan resolusi tersebut tidak dapat diadopsi oleh AIPA sehubungan dengan adanya prinsip *non-interference* di ASEAN dan isu tersebut tidak ditempatkan sebagai prioritas utama dalam Sidang dimaksud. Di lain sisi, kurangnya capaian konkrit dari upaya yang dilakukan ASEAN dan Persatuan Bangsa-Bangsa menyebabkan semakin memburuknya kondisi keamanan dan keselamatan rakyat Myanmar.

1 Februari 2022 ini menandai satu tahun kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar dan telah membawa Myanmar memasuki situasi krisis. Perhatian masyarakat internasional tertuju pada Myanmar guna meringankan penderitaan rakyat Myanmar sejalan dengan keinginan untuk memastikan bahwa harapan-harapan demokratis mereka dihormati. Laporan terakhir mengenai situasi di lapangan sangat mengkhawatirkan. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (*The Assistance Association for Political Prisoners*) mengungkapkan jumlah kematian sipil sejak kudeta Februari 2021 telah mencapai 1,500 juta jiwa—di mana sekitar 100-nya adalah anak-anak. Pada August 2021, Liga Perempuan Burma (*the Women's League of Burma*) juga melaporkan sejumlah tantangan lain yang harus dihadapi warga Myanmar, khususnya perempuan, ketika mereka menjalani kehidupan selama pandemi di tengah kudeta kekerasan dan konflik internal yang melumpuhkan. Kesehatan para pekerja perempuan juga berada di bawah ancaman saat mereka harus melakukan gerakan di bawah tanah untuk menghindari pemerintah junta militer yang memburu para profesional



medis yang memiliki hubungan dengan Gerakan Pembangkangan Sipil (*Civil Disobedience Movement-CDM*).

Sebagai penghargaan terhadap prinsip-prinsip Piagam ASEAN dalam menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan, BKSAP DPR RI menyetujui untuk menerima audiensi yang diajukan oleh *Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw* (CRPH).

#### **D. Dasar Hukum**

1. Surat nomor 107/AIPA/XII/2021 dari ASEAN-*Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) tanggal 17 Desember 2021 perihal permohonan pelaksanaan "*Parliament-2-Parliament Meeting*" yang diajukan oleh *Committee Representing Pyidaungsu Hutlaw* (CRPH).
2. Undangan dari *Westminster Foundation for Democracy* tanggal 25 Januari 2022 perihal kegiatan *Friendly Talk* antara BKSAP DPR RI dengan *Committee Representing Pyidaungsu Hutlaw* (CRPH) tanggal 7 - 9 Februari 2022.
3. Surat Tugas Nomor 09/D/ST/PD-DN/BKSAP-KSR/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Perjalanan dinas ke Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam rangka menghadiri undangan *Westminster Foundation for Democracy* untuk melaksanakan kegiatan *Parliament 2 Parliament* dengan *Committee Representing Pyidaungsu Hutlaw* (CRPH) pada tanggal 7 - 9 Februari 2022.
4. Disposisi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Nomor Agenda 78 tanggal 27 Januari 2022 perihal permohonan izin kegiatan BKSAP ke daerah
5. Surat Ketua BKSAP kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor T/2071/PW.1/02/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal permohonan izin kegiatan BKSAP ke daerah

#### **E. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Maksud dilaksanakannya pertemuan antara BKSAP DPR RI dengan CRPH ini adalah:

- 1) Menginisiasi komunikasi antara BKSAP DPR RI dengan CRPH, terutama terkait upaya pencarian solusi terhadap krisis di Myanmar.

- 2) Melakukan pertukaran informasi dan *best practice* terkait transformasi militer dan demokrasi di Indonesia dan Myanmar.
- 3) Mengidentifikasi kendala dan hambatan terkait implementasi lima poin konsensus ASEAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Memperdalam pemahaman BKSAP DPR RI mengenai informasi terkini terkait krisis di Myanmar.
- 2) Mengeksplorasi kolaborasi yang potensial antara BKSAP DPR RI dan CRPH.
- 3) Menunjuk *focal point* dari BKSAP DPR RI dan CRPH untuk memimpin koordinasi dan menindaklanjuti potensi kerjasama di luar dialog.

## F. Misi Delegasi

DPR RI telah ditetapkan untuk menjabat keketuaan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) pada tahun 2023 dan setahun sebelumnya DPR RI sebaiknya telah menyiapkan *Roadmap* menuju keketuaan 2023. Sebagai Presiden AIPA 2023, DPR RI sangat diharapkan mampu berperan aktif dan memanfaatkan peluang dan tantangan agar tercapai tujuan kepentingan nasional, antara lain dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak secara adil dan seimbang. Inisiatif DPR RI untuk membuka dialog dengan CRPH ini akan sangat mendukung peran keketuaan DPR RI nanti.

## G. Susunan Delegasi

Delegasi BKSAP yang hadir dalam pertemuan ini ada 13 orang dan dipimpin oleh Ketua BKSAP, yaitu:



**Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Si**  
**F-P-Gerindra/A-86**  
**Ketua BKSAP | Anggota Komisi I**





**Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA, MBA**  
**F-PDIP/A-139**  
**Wakil Ketua BKSAP | Anggota Komisi XI**



**Putu Supadma Rudana, MBA**  
**F-P-Demokrat/A-563**  
**Wakil Ketua BKSAP | Anggota Komisi VI**



**Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng**  
**F-PKS/A-422**  
**Wakil Ketua BKSAP | Anggota Komisi II**



**Ir. H. Achmad Hafisz Tohir**  
**F-PAN/A-487**  
**Wakil Ketua BKSAP | Anggota Komisi XI**



**dr. Sofyan Tan**  
**F-PDIP/A-137**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi X**



**Drs. H. Darul Siska**  
**F-P-Golkar /A-271**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi IX**



**Ir. H. Kamrussamad, ST., M.Si**  
**F-P-Gerindra/A-79**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi XI**



**Ratih Megasari Singkaru, M.Sc**  
**F-P-Nasdem/A-402**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi XI**



**Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LL.M**  
**F-P-Demokrat/A-546**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi XI**



**H. Syahrul Aidi Maazat, LC., MA**  
**F-PKS/A-418**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi V**



**Primus Yustisio, SE., MAP**  
**F-PAN/A-498**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi XI**



**Ema Umiyyatul Chusnah**  
**F-PPP/A-471**  
**Anggota BKSAP | Anggota Komisi IV**

## H. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Sebelum pelaksanaan kegiatan, telah dilakukan persiapan-persiapan teknis dan substansi agar kegiatan berjalan lancar. Pertemuan virtual antara BKSAP dengan CRPH ini perlu diperlakukan dengan penuh kehati-hatian dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Negara Myanmar sedang dalam kondisi konflik dimana Junta Militer berkuasa dan CRPH berada dalam pengasingan
2. Parlemen Myanmar sedang dibekukan (*suspended*) keanggotaannya di *Inter-Parliamentary Union* (IPU).
3. Junta Militer dinilai oleh ASEAN belum melaksanakan tuntutan *Five-Points Consensus* ASEAN sehingga belum ada satupun negara ASEAN yang mengakui secara resmi (*engagement*) dengan Junta Militer yang berkuasa
4. Parlemen Myanmar hasil Pemilu 2020 telah dianulir oleh Junta Militer dan seluruh kekuasaan legislatif diserahkan kepada Commander-in-Chief of Defense Service Min Aung Hlaing (MAH) sehingga CRPH belum dapat dikatakan sebagai Parlemen Myanmar yang terlegitimasi
5. Sejak SIUM ke-41 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA), Myanmar tidak diperkenankan hadir dalam Sidang-Sidang AIPA karena Parlemen Myanmar telah dibekukan dan legitimasi Junta Militer belum diakui.

Guna menghindari salah pengertian oleh publik, maka Sekretariat BKSAP atau Biro Kerja Sama Antar Parlemen melakukan kolaborasi dengan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD) agar penyelenggaraan pertemuan virtual ini tidak memihak pada salah satu kubu yang bertikai di Myanmar. WFD membantu Sekretariat BKSAP untuk melakukan persiapan teknis maupun substansi dan membantu komunikasi dengan CRPH.

Persiapan substansi dilakukan oleh Tenaga Ahli BKSAP mencakup penyiapan poin-poin intervensi untuk anggota delegasi, selayang pandang mengenai CRPH dan situasi terkini di Myanmar. Adapun persiapan teknis mencakup penyiapan tempat pertemuan secara daring, pengajuan anggaran, pengurusan dokumen perjalanan, jadwal keberangkatan dan jadwal acara, pembuatan Surat Tugas, komunikasi dengan Sekretariat Tetap AIPA.



## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Agenda Kegiatan

Sesuai dengan *Term of Reference* dari *Westminster Foundation for Democracy (WFD)*, maka kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7-9 Februari 2022 dengan agenda kegiatan sebagai berikut:

PREPARATORY MEETING   7 FEBRUARY 2022   14.00 - 16.00 WIB
Description
<p><b>Technical Meeting with BKSAP &amp; Secretariat</b></p> <p><i>Discussion on Draft of Outcome Document and other matters concerning the P2P Meeting such as rundown of the meeting, the format, etc.</i></p>
P2P FRIENDLY TALK
“DPR RI and CRPH Bilateral Dialogue: Situational Update on Democracy and Peace in Myanmar”
Tuesday, 8 February 2022   14.00 - 16.00 (GMT+7)
Description
<p><b>Opening Remarks and Introduction</b></p> <p><i>Remarks from Chair of BKSAP DPR RI to welcome all participants. Roll call of all MPs participating in the dialogue by DPR RI.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hon. Dr. Fadli Zon, SS, Msc - Chair, Inter-Parliamentary Cooperation Committee   DPR RI</li></ul>
<p><b>CRPH Introduction, Situation Updates, and Express Intentions</b></p> <p><i>Roll call of all MPs participating in the dialogue by CRPH. The CRPH to share the economic and political instability in Myanmar after the military takeover on 1 February 2021 that forced Myanmar into a crisis. Furthermore, CRPH will also share their concerns around:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>The situation of humanitarian aid and COVID-19 response in Myanmar</i></li><li>2. <i>The establishment and coordination between interim democratic opposition</i></li></ol> <p><i>On top of that, CRPH to express the intentions of the request of the meeting.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt, Chairman of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw   CRPH</li><li>• Hon. Mr. Tin Ko Ko Oo, Secretary of the CRPH International Relations Committee   CRPH</li></ul>
<b>Interactive Dialogue</b>

*The Indonesian Parliament to share their general views on the Myanmar crises and followed by an interactive dialogue on the follow up plan to support CRPH in responding Myanmar's humanitarian and political crisis.*

- Hon. Dr. Mardani Ali Sera, Vice Chair of the House Committee for Inter-Parliamentary Cooperation | DPR RI

#### **Closing Statements**

*Closing statement from Vice Chair of BKSAP DPR RI and Chair of CRPH delegate to close the session.*

- Hon. Dr. Mardani Ali Sera, Vice Chair of the House Committee for Inter-Parliamentary Cooperation | DPR RI
- H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt, Chairman of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw | CRPH

### **WORKSHOP**

**"Follow Up on the DPR RI and CRPH Bilateral Dialogue:  
Situational Update on Democracy and Peace in Myanmar"**  
Wednesday, 9 February 2022 | 09.00 - 13.00 (GMT+7)

#### **Description**

##### **Registration**

- Networking coffee chat

##### **Opening Remarks**

- Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti - Head of Bureau, BKSAP | DPR RI
- Agus Wijayanto - Country Representative, Indonesia | WFD

##### **Setting the Context of Indonesian Parliament's Role in Supporting Myanmar Democracy and Peace**

- Chaired by Lina Alexandra - Senior Researcher | Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

##### **Parliaments' Role in Strengthening Bilateral Cooperation to Respond Myanmar's Humanitarian Crisis**

- Charles Santiago MP, Chairman | ASEAN Parliamentarians for Human Rights / Member of Parliament | Malaysia

##### **Ensuring the Continuity of Regional Humanitarian Effort in Crisis Situations: A Case of Myanmar**

- Adelina Kamal - Former Executive Director of ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)

##### **Q&A Session**

##### **Closing and Lunch Break**

##### **Consolidating and Finalising Outcome Document by Expert BKSAP DPR RI**

## B. Jalannya Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dilaksanakan dalam format *Friendly Talk* setup, sebagai refleksi terhadap apa yang terjadi pada Myanmar dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sekaligus fokus pada pertukaran informasi mengenai situasi terkini dan perhatian terhadap krisis sehingga mampu mengeksplorasi area kerjasama yang potensial antara kedua belah pihak untuk memperbaiki situasi di Myanmar serta mendiskusikan area kebijakan tematik penting yang relevan.

### **Senin, 7 Februari 2022**

Pembahasan *Draft of Outcome Document* dan persiapan teknis terkait penyelenggaraan diskusi dengan CRPH the P2P Meeting such as rundown of the meeting, the format, etc.

### **Selasa, 8 Februari 2022**

#### ***Discussion Forum (P2P Friendly Talk)***

##### **a. Sesi Pembukaan Seremonial**

##### **1. *Opening Remarks* oleh Ketua BKSAP (Dr. Fadli Zon)**



Dr. Fadli Zon mengawali pidato pembukaan dengan penyampaian harapan agar rakyat Myanmar senantiasa berada dalam keadaan yang aman, baik dan sehat dalam masa pandemi yang panjang ini. Merupakan suatu kehormatan bagi BKSAP, untuk dapat menjalin dialog dengan CRPH meskipun berlangsung secara virtual. Dr. Fadli Zon

selanjutnya memperkenalkan diri dan para pimpinan BKSAP lainnya, disusul dengan pengenalan Anggota BKSAP DPR lainnya yang hadir.



Dr. Fadli Zon menjelaskan secara singkat mengenai komposisi BKSAP yang mencakup Anggota dari berbagai fraksi dan komisi, sehingga menjadikannya strategis untuk mengakomodasi berbagai isu global yang kompleks dan luas spektrumnya. BKSAP juga merupakan alat kelengkapan parlemen yang strategis dalam memperkuat kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks pertemuan saat ini, dalam mewujudkan Asia Tenggara yang stabil, aman, dan damai. Karena ketiga hal tersebut menjadi kunci dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.





Dijelaskan bahwa ketika junta militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021, Indonesia merupakan negara pertama yang merespon situasi tersebut. Parlemen Indonesia melalui BKSAP mengadakan konferensi pers mengutuk kudeta dan menekankan bahwa hal tersebut merupakan kemunduran besar dalam pengembangan demokrasi dan hal tersebut secara jauh akan memunculkan instabilitas di Kawasan.

DPR memiliki perhatian yang sama dengan Pemerintah Indonesia, bahwa keamanan dan kesejahteraan rakyat Myanmar adalah prioritas utama dan hal tersebut hanya dapat dijamin apabila demokrasi dapat dipulihkan melalui penguatan hukum, tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang konstitusional.

BKSAP mendukung peran pemerintah Indonesia sebagai *peace maker*, *problem solver* dan *bridge builder* dalam penyelesaian krisis Myanmar yang harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan dan patuh terhadap pelaksanaan penuh prinsip dan nilai yang tertuang dalam Piagam ASEAN, termasuk demokrasi, penghargaan terhadap HAM, tata pemerintahan yang baik, penegakkan hukum dan pemerintahan yang konstitusional. BKSAP juga mendorong pemerintah Indonesia untuk secara konsisten mendesak *Tatmadaw* untuk segera melaksanakan lima poin konsensus ASEAN.



Dalam konteks diplomasi parlemen, dijelaskan oleh Fadli Zon bahwa BKSAP telah secara aktif menyuarakan pentingnya pelaksanaan lima poin consensus sebagaimana telah disepakati oleh para pimpinan tinggi ASEAN pada 2021, melalui forum-forum parlemen seperti AIPA, APPF dan IPU. Pada SIUM ke-42 AIPA bahkan parlemen Indonesia mendesak parlemen-parlemen di ASEAN untuk menempatkan prinsip non-intervensi secara proporsional dalam konteks hak asasi manusia. Parlemen Indonesia juga mendorong Parlemen Anggota AIPA untuk memutuskan resolusi terkait krisis Myanmar dan mendesaknya penerapan segera lima poin konsensus ASEAN.

Dr. Fadli Zon menyampaikan, belajar dari pengalaman gagalnya usulan rancangan resolusi yang diajukan Parlemen Indonesia diadopsi karena tidak tercapainya consensus, disadari bahwa berbagai upaya diplomatis melalui ASEAN dan AIPA terhalang oleh pemahaman kaku mengenai prinsip non-intervensi sejalan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang masih diimplementasikan saat ini.



Pengalaman BKSAP lainnya terkait isu kemanusiaan yang diperjuangkan sebelum SIUM ke-42 AIPA, juga membuktikan bahwa prinsip non-intervensi tersebut masih menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda demokrasi dan kemanusiaan di Myanmar. BKSAP bahkan telah mengupayakan untuk mengusulkan perubahan mekanisme pengambilan keputusan di AIPA terlebih dahulu, dari consensus menjadi pengambilan suara (*voting*) ketika berhubungan

dengan masalah yang mendesak. Namun upaya tersebut tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas parlemen Anggota AIPA.

Kendati berbagai upaya parlemen Indonesia tersebut masih belum bias mendatangkan hasil yang ideal sebagaimana diharapkan, namun implementasi lima poin konsensus secara segera masih menjadi fokus diplomasi parlemen Indonesia. Diakui oleh Dr. Fadli Zon bahwa diplomasi merupakan proses berkesinambungan yang harus terus dilaksanakan secara konsisten. Oleh karenanya, BKSAP akan terus menyuarakan penerapan lima poin konsensus secara segera melalui berbagai forum parlemen yang memungkinkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, parlemen Indonesia akan terus melanjutkan distribusi bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Myanmar.

## 2. *Opening Remarks* oleh *Chair of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw - CRPH (Aung Kyi Nyunt)*



Aung Kyi Nyunt memperkenalkan secara singkat dirinya sebagai Ketua *Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw*, terpilih sebagai Anggota *Amyotha Hluttaw (Upper House)* dari partai *National League for Democracy* mewakili daerah pemilihan *Magwar Region*. Aung Kyi Nyunt menyampaikan bahwa dirinya merasa terdorong dan termotivasi dengan pidato pembukaan yang disampaikan oleh Dr. Fadli Zon dan

hal tersebut merupakan inspirasi besar bagi revolusi demokrasi di Myanmar.

### 3. *Opening Remarks* oleh *Chair of the International Relations Committee of CRPH (Mrs. Myat Thida Tun)*



Myat Thida Tun memperkenalkan dirinya secara singkat sebagai *Chair of the International Relations Committee of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw*, terpilih sebagai Anggota *Amyotha Hluttaw (Upper House)* dari partai *National League for Democracy* mewakili daerah pemilihan *Mon State*.

Melalui diskusi ini, Myat Thida Tun percaya kedua belah pihak dapat berdiskusi dan menaruh harapan terhadap kerjasama yang lebih jauh ke depan.

### **Sesi Dialog**

Sesi dialog didesain agar peserta saling aktif memberikan pertanyaan dan tanggapan. Sebagai pemantik diskusi, Dr.Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP memimpin jalannya dialog.

Membuka sesi Dialog, Dr. Mardani Ali Sera menggarisbawahi upaya parlemen Indonesia melalui BKSAP pada Sidang Umum ke-42 AIPA tahun 2021 dalam mendorong parlemen Anggota AIPA untuk mengakui bahwa



krisis Myanmar berpotensi untuk menjadi krisis Kawasan dan membutuhkan penyelesaian segera melalui implementasi lima poin konsensus ASEAN. Namun dikarenakan tidak tercapainya konsensus, usulan Indonesia terkait resolusi konflik Myanmar belum dapat terakomodir.



Namun dengan kapasitas yang dimiliki BKSAP dalam konteks diplomasi parlemen, DPR melalui BKSAP akan secara kontinu menyuarakan penerapan segera lima poin konsensus ASEAN, pada berbagai forum parlemen yang relevan.

Terkait krisis di Myanmar, Dr. Mardani Ali Sera menekankan pada empat hal: pertama, keamanan dan kesejahteraan rakyat Myanmar sebagai prioritas; kedua restorasi demokrasi; ketiga urgensi perwujudan stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan Kawasan; dan keempat pentingnya bantuan kemanusiaan bagi seluruh masyarakat Myanmar.

Dr. Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa parlemen Indonesia juga mengetahui bahwa resistensi dan protes yang dilakukan masyarakat Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021 telah mengakibatkan sekitar 7000 orang ditahan, dijatuhi hukuman dan dipenjara sementara 1200 warga sipil terbunuh oleh militer Myanmar.

## 1) Pertanyaan/Pernyataan 1 (*Chair of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw - CRPH - Aung Kyi Nyunt*)

CRPH Sangat mengapresiasi bagaimana Parlemen Indonesia telah berupaya keras menyuarakan krisis di Myanmar melalui berbagai forum. Mewakili CRPH, Aung Kyi Nyunt juga menghargai dukungan Indonesia terhadap rakyat Myanmar. Aung Kyi Nyunt mengakui bahwa situasi di Myanmar saat ini sangat buruk.

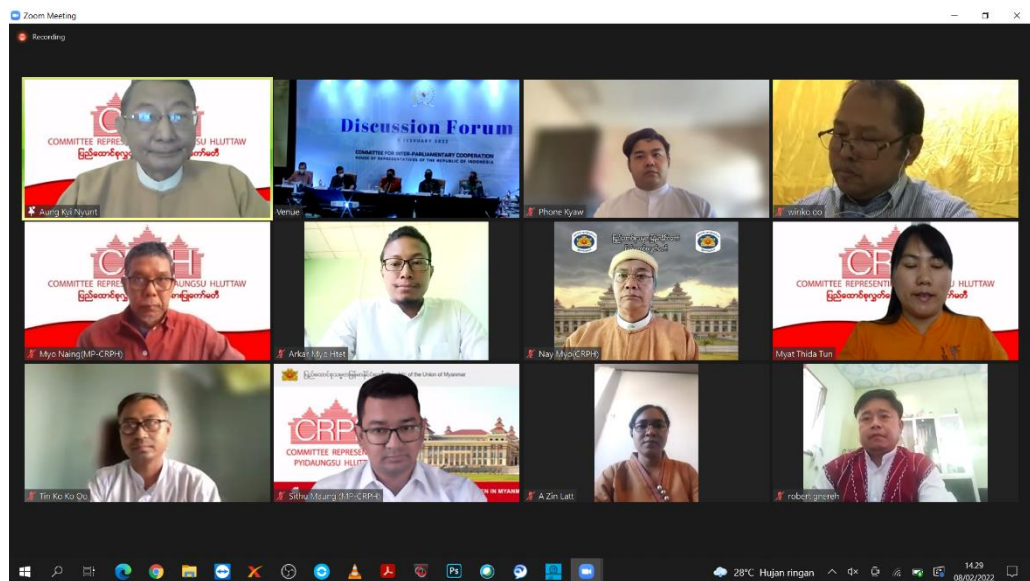
Pada saat pertemuan Pimpinan Tinggi ASEAN di Indonesia, *Tatmadaw* hadir pada pertemuan tersebut dan ikut menyepakati rekomendasi 5 poin konsensus ASEAN. Namun ketika kembali ke Myanmar, *Tatmadaw* secara penuh mengabaikan kesepakatan tersebut dan bahkan melakukan kekerasan yang lebih intens kepada masyarakat Myanmar. Aung Kyi Nyunt menggarisbawahi oleh karenanya, bahwa *junta* telah abai terhadap kesepakatan tersebut.



Myanmar sangat membutuhkan dukungan dari Indonesia agar *junta* dapat segera mengakhiri kudeta di Myanmar. Dan melihat situasi terkini di Myanmar, Aung Kyi Nyunt menekankan bahwa sangat penting bagi Lembaga bantuan kemanusiaan agar tidak berurusan atau terlibat dengan penguasa *junta* militer. Karena jika Lembaga bantuan kemanusiaan menyalurkan bantuannya melalui *junta*, tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan sampai kepada rakyat Myanmar yang membutuhkan. Hal yang paling utama saat ini adalah mendesak

*junta* untuk menghentikan kekerasan dan tekanan militer. Jika tidak, sekeras apapun upaya yang kita lakukan dan sebesar apapun bantuan kemanusiaan yang diberikan, tidak akan menghasilkan apa-apa selama *junta* masih berkuasa dalam kudeta. Solusi terbaiknya adalah agar militer mengakhiri pemerintahan dictator dan kudetanya.

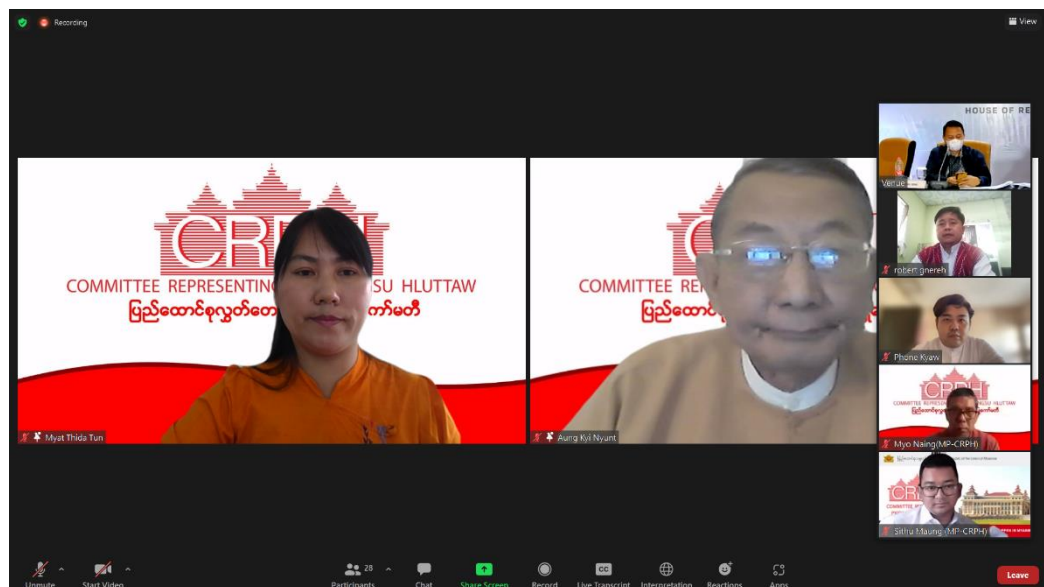
CRPH meminta bantuan kepada seluruh Anggota BKSAP yang hadir dalam pertemuan untuk membantu Myanmar melalui dukungan penghentian kudeta oleh militer, secepatnya. Pada SIUM ke-42 AIPA, meskipun CRPH telah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan sekretariat AIPA agar dimungkinkan hadir dalam sidang, namun Presiden AIPA tidak mengabulkan permintaan tersebut. Namun demikian, CRPH mengapresiasi bantuan Sekretariat AIPA yang telah mengakomodasi permintaan CRPH dengan meneruskan email CRPH yang berisi permintaan dukungan, ditujukan kepada Presiden AIPA dan pihak yang relevan.



Aung Kyi Nyunt menyebutkan tentang pembunuhan penasihat hukum partai penguasa Liga Nasional untuk Demokrasi (*National League for Democracy*), U Ko Ni, yang tewas ditembak di bandara Myanmar pada 2021, sepulang dari Indonesia dalam Misi Pencarian Fakta. U Ko Ni oleh karenanya tidak memiliki kesempatan untuk berbagi informasi dan pengalaman yang ia dapatkan dari hasil kunjungan Misi Pencarian Faktanya di Indonesia. Insiden tersebut, ditegaskan oleh Aung Kyi

Nyunt, merupakan salah satu kasus kejahatan HAM (oleh militer) yang belum ada penyelesaiannya.

Aung Kyi Nyunt menyadari bahwa Myanmar dan Indonesia memiliki banyak perbedaan sebagai sebuah negara, namun juga berbagi latar belakang sejarah yang sama. Oleh karenanya, melalui pertemuan ini diharapkan dapat mendatangkan banyak manfaat dan nilai bagi kerjasama dan hubungan kedua parlemen di masa mendatang. CRPH juga senantiasa berusaha mendukung Indonesia dengan semua informasi yang dibutuhkan di masa mendatang dan ingin membuka jalur komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.



Aung Kyi Nyunt menyebutkan bahwa Indonesia juga mengalami kudeta di tahun 1965 namun demikian berhasil bertahan dari penguasaan militer dan mengembalikan demokrasi. Hal tersebut menjadi latar belakang sejarah yang menginspirasi bagi Myanmar, mengingat militer telah berkali-kali melakukan kudeta dan Myanmar masih belum mampu untuk kembali ke jalan demokrasi.

Meskipun pemerintahan sipil berhasil terbentuk lima tahun lalu, namun tidak pernah benar-benar dapat memiliki demokrasi yang sesungguhnya sehubungan dengan okupasi oleh perwakilan militer di Lembaga legislatif dan di administrasi pemerintahan yang sangat berpengaruh. Aung Kyi Nyunt menyebutkan saat ini merupakan momentum untuk mengakhiri kediktatoran militer dan



mengembalikan demokrasi di Myanmar. Setelah kudeta, anggota parlemen terpilih berjuang dengan membentuk CRPH serta NUG.

Aung Kyi Nyunt menyampaikan bagaimana buruknya perlakuan militer terhadap etnis minoritas termasuk Rohingnya, di Myanmar selama bertahun-tahun. CRPH telah mempublikasi *statement* terkait isu Rohingnya dan hak-hak masyarakat Rohingnya serta etnis minoritas lainnya. *National Unity Government* juga tengah berupaya menandatangani statuta Roma untuk mendesak militer Myanmar bertanggung jawab di Pengadilan Internasional (*International Court of Tribunal* dan *International Court of Justice*) atas Kasus Rohingnya.

Aung Kyi Nyunt menjelaskan bahwa kondisi Myanmar saat ini kian memburuk karena rakyat Myanmar di seluruh negara mengekspresikan penentangan dan keberatannya terhadap kudeta militer serta kekuasaan junta dengan cara-cara yang damai. Namun militer merespon dengan kekerasan, membunuh, menahan, menginterogasi, melakukan penangkapan dan terkadang membakar habis bangunan publik. Jika masyarakat internasional ingin memberikan dukungan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar, CRPH meminta komunitas internasional untuk berdiri dan bekerjasama dengan NUG sebagai perwakilan pemerintah Myanmar yang disebut Aung Kyi Nyunt memegang mandat dari rakyat Myanmar.

CRPH juga menaruh ekspektasi dan harapan yang sangat besar pada Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-44 IPU tahun ini.

## **2) Pertanyaan/Pernyataan 2 (*Chair of the International Relations Committee of CRPH - Myat Thida Tun*)**

Myat Thida Tun menyampaikan terima kasih kepada Indonesia yang masih berdiri bersama Myanmar dan mendukung demokrasi untuk dapat ditegakkan kembali di Myanmar selama 1 tahun ini sejak kudeta 1 Februari 2021.



Terkait lima poin konsensus ASEAN, CRPH sangat setuju. Sayangnya belum terlihat hasil konkrit dari penguasa militer dalam implementasinya. Kekerasan yang dilakukan militer justru semakin intens. Yang dibutuhkan Myanmar saat ini adalah bantuan kemanusiaan terhadap lebih dari seratus ribu rakyat Myanmar yang melakukan pengungsian serta perlindungan kesehatan segera, mengingat gelombang Covid-19 yang tengah muncul kembali.

CRPH sangat berharap dapat diundang dalam Sidang AIPA tahun ini, sebagai bentuk dukungan dari negara tetangga di ASEAN. Karena selama ini Myanmar justru banyak mendapatkan dukungan dari negara-negara barat dan eropa. CRPH tidak ingin Myanmar merasa ditinggalkan oleh negara-negara tetangganya dalam satu kawasan, dalam situasi krisis ini. CRPH berharap Indonesia dapat menyampaikan detail situasi dan informasi yang tengah dialami Myanmar saat ini kepada komunitas global.

Myat Thida Tun menjelaskan bahwa sebenarnya terhadap persepsi yang keliru dari negara-negara tetangga dengan mengira militer telah menang terhadap perlawanan masyarakat sipil. Kontrol militer sesungguhnya semakin memburuk dan melemah dari hari ke hari karena sejumlah masyarakat berhasil melawan balik militer dan menguasai sejumlah wilayah. CRPH ingin Indonesia menyampaikan informasi ini kepada komunitas global serta negara-negara tetangga di kawasan.

### 3) Pernyataan/Pertanyaan 3 (Wakil Ketua BKSAP - Dr. Sihar Sitorus)



Dr. Sihar Sitorus menyoroti tentang Situasi Covid di lapangan yang juga tidak kalah pentingnya. Secara domestik, pemerintah Indonesia terus berupaya menyediakan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakatnya, dalam mengatasi pandemi. Parlemen Indonesia mendorong pemerintah untuk melanjutkan kerjasama dengan ASEAN *Coordinatinh Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Centre) untuk menyediakan bantuan dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Dr Sihar Sitorus menjelaskan bahwa parlemen Indonesia telah secara konsisten menyuarakan di forum-forum parlemen, tentang perhatian terhadap situasi Covid-19 dan tantangan kesehatan yang dihadapi Myanmar. Parlemen Indonesia akan terus mendesak semua pihak untuk memfasilitasi pengiriman dan distribusi vaksin Covid-19 yang aman, merata dan tanpa hambatan ke area-area konflik, bersamaan dengan memastikan keamanan dan perlindungan terhadap petugas medis dan kemanusiaan yang melaksanakan tugas tersebut.

Disampaikan oleh Dr. Sihar Sitorus bahwa parlemen Indonesia juga akan mendukung upaya untuk meningkatkan peran ASEAN yang lebih nyata dalam mendukung situasi kemanusiaan yang dihadapi para pengungsi dan masyarakat yang terlantar, termasuk dari negara

bagian Rakhine, melalui penyediaan bantuan kemanusiaan, bantuan proses repatriasi (pemulangan) dan memajukan pembangunan berkelanjutan.

**4) Pertanyaan/Pernyataan 4: (Wakil Ketua BKSAP - Putu Supadma Rudana, MBA)**

Putu Supadma Rudana menyoroti tentang isu pengungsi, di mana upaya Indonesia sudah sangat jauh, dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka. Disampaikan oleh Putu Supadma Rudana, sebagai negara non-peserta Konvensi tentang Pengungsi 1951 (*Refugee Convention 1951*) dan Protokol 1967, apa yang dilakukan Indonesia telah melampaui tanggung jawab yang seharusnya. Khususnya dalam menyelamatkan dan menyediakan penampungan sementara kepada lebih dari tiga belas ribu pengungsi dari empat puluh sembilan negara.



Upaya Indonesia berasal dari komitmen terhadap kemanusiaan, bahwa dalam situasi darurat, pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan para pengungsi, terutama mereka yang rentan. Termasuk di antaranya, pengungsi Rohingnya. Dijelaskan bahwa pada 2021, Indonesia sekali lagi telah menyelamatkan sebuah kapal yang berisi delapan puluh satu pengungsi dari Rohingnya dari situasi darurat.



Pemerintah Indonesia juga berhasil melaksanakan tanggap darurat yang sejalan dengan protokol pencegahan Covid-19 ketika menyelamatkan dan memobilisasi para pengungsi.

Disampaikan oleh Putu Supadma Rudana bahwa tindakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka didasarkan pada beberapa prinsip: 1) Indonesia tetap konsisten dan berupaya ekstra dalam menerapkan prinsip *non-refoulement*, di luar tanggung jawabnya sebagai negara non-peserta Konvensi Pengungsi; 2) Indonesia memperhatikan keselamatan para pengungsi berkebutuhan khusus, terutama ibu hamil, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia; 3) Indonesia terus mendorong kepemimpinan UNHCR dan IOM, sebagai organisasi yang diamanatkan, dalam penanganan pengungsi; 4) Indonesia tetap konsisten dalam mengupayakan pelaksanaan tanggung jawab bersama oleh negara-negara peserta Konvensi Pengungsi, terutama melalui pemindahan tempat tinggal; 5) Indonesia tetap mendukung upaya penyelesaian akar masalah di negara asal untuk memungkinkan terciptanya lingkungan yang aman dan bermartabat yang memungkinkan pemulangan sukarela.



Putu Supadma Rudana menegaskan dukungan parlemen Indonesia terhadap upaya pemerintah untuk menyediakan kondisi penerimaan yang aman dan manusiawi bagi para pengungsi serta akses terhadap perlindungan internasional, termasuk prosedur suaka. Putu Supadma

Rudana berharap negara-negara di Asia Tenggara akan bersatu dalam prinsip solidaritas dan berbagi tanggung jawab untuk mengatasi masalah pergerakan yang tidak teratur di laut (*irregular movement*) serta memenuhi kebutuhan kemanusiaan Pengungsi Rohingya.

**5) Pertanyaan/Pernyataan 5: (Anggota BKSAP - Ratih Megasari Singkaru)**



Ratih Megasari Singkaru menjelaskan, tidak dapat disangkal bahwa negara-negara di ASEAN memiliki orientasi kebijakan luar negeri yang asimetris menyikapi situasi di Myanmar. Saat ini Indonesia dalam upaya membangun hubungan bilateral melalui komunikasi dengan CRPH. Penting juga untuk membangun koordinasi dan kolaborasi multilateral, terutama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang berbagi kesamaan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana negara-negara ini dapat duduk bersama mencari solusi atas krisis di Myanmar tanpa melukai persatuan dan sentralitas di ASEAN.

**6) Pertanyaan/Pernyataan 6 (Anggota CRPH - Sithu Maung)**

Sithu Maung menjelaskan sedikit latar belakangnya sebelum terpilih sebagai anggota Pyithu Hluttaw dari partai *National League for Democracy*, mewakili daerah pemilihan Pabedan. Sebelumnya Sithu Maung adalah seorang tahanan politik. Ia dijatuhi hukuman empat setengah tahun oleh pemerintahan otoritarian karena revolusi yang

dilakukannya. Penahanan merefleksikan situasi dan penyiksaan di Myanmar yang sesungguhnya. Sithu Maung mengakui, di antara dua komunitas di Myanmar sempat terjadi konflik yang melibatkan etnis minoritas Rohingnya dan Sithu Maung memahami situasinya. Oleh karena itu, CRPH bersama NUG telah mengeluarkan kebijakan terkait isu Rohingnya. Sithu Maung menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu anggota parlemen yang beragama islam. Sithu Maung menyatakan bahwa transformasi dan reformasi di Indonesia sebenarnya merupakan inspirasi besar untuk militer Myanmar, namun tidak demikian dengan kekuasaan militer dalam politik di Myanmar. Konstitusi Myanmar tahun 2008 menjadi alasan bagi Myanmar untuk menanamkan pengaruhnya dalam politik. Militer beranggapan bahwa kudeta yang mereka lakukan sah sesuai konstitusi Myanmar.



Militer menuduh bahwa NUG melakukan keberpihakan terhadap satu agama, dan bukan pada agama Budha yang merupakan mayoritas. Hal ini telah memunculkan konflik antara umat budha dan umat agama lainnya. Agama menjadi salah satu senjata yang digunakan oleh militer untuk menanamkan kekuasaannya dalam politik. Di masa mendatang, Myanmar mengupayakan untuk membangun komunitas tanpa diskriminasi dengan penghormatan terhadap hukum di Myanmar untuk mewujudkan Myanmar yang demokratis. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh CRPH dan NUG pada dunia internasional.

## 7) Tanggapan *Chair of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) - Aung Kyi Nyunt*

Aung Kyi Nyunt menjelaskan terkait Covid-19, Kementerian Kesehatan dari NUG telah meluncurkan program untuk mendukung warga negara melawan pandemi. NUG juga bekerjasama dengan NGO dan Thailand di perbatasan.



CRPH menyadari bahwa banyak masyarakat Myanmar yang mengungsi untuk menyelamatkan diri dari junta saat ini karena banyak pemukiman yang juga telah dibakar habis oleh militer. CRPH mengharapkan dukungan Indonesia untuk berbicara dengan Thailand agar membuka perbatasannya, membantu dan menerima masyarakat Myanmar yang mengungsi ke perbatasan Thailand. CRPH juga berharap negara tetangga lainnya, dalam semangat solidaritas, termasuk Indonesia untuk memberikan bantuan terhadap pengungsi dari Myanmar.

Saat ini NUG akan berusaha keras untuk berdiri sebagai pemerintahan revolusioner dan akan sangat senang sekali menerima bantuan kemanusiaan, khususnya dari Indonesia.



## 8) Pertanyaan/Pernyataan 7 (Anggota CRPH - Robert Nyal Yal)

Robert Nyal Yal memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari salah satu etnis minoritas di Myanmar, Kayah. Ia terpilih sebagai anggota Amyotha Hluttaw dari partai *Kayah State Democratic Party* mewakili daerah pemilihan *Kayah State*. Robert Nyal Yal berbagi pengalaman tentang yang dialami etnis minoritas di Myanmar di lapangan.

Ada beragam etnis di Myanmar, kebanyakan etnis minoritas mendapatkan hak yang terbatas selama bertahun-tahun dan mendapatkan perlakuan kekerasan serta penyiksaan dari militer.



Kekerasaan yang didapatkan dari militer saat ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi etnis minoritas. Robert Nyal Yal menjelaskan dirinya sebagai contoh anggota etnis minoritas yang berasal dari negara bagian kecil di Myanmar dekat perbatasan Thailand. Setiap tahun banyak masyarakat Myanmar yang lari dari junta ke perbatasan untuk mengungsi ke negara lain, namun tentu saja sulit mendapatkan akses masuk ke negara lain. Robert Nyal Yal menyebutkan bahwa harapan bersama rakyat Myanmar saat ini oleh karenanya supaya kediktatoran penguasa militer dapat segera diakhiri.

CRPH bersama NUG telah merancang dan menyusun piagam demokrasi yang diharapkan akan mampu menjamin perlindungan dan keselamatan seluruh etnis minoritas Myanmar tanpa kecuali. Robert

Nyal Yal sekali lagi meminta dukungan Indonesia terhadap pengungsi Myanmar yang saat ini mencari perlindungan dan keselamatan serta bantuan dalam menghadapi Covid-19.

### 9) Tanggapan (Ketua BKSAP - Dr. Fadli Zon)

Dr. Fadli Zon menyarankan kepada CRPH bersurat ke IPU melalui Komite untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi untuk mengangkat isu Myanmar di SIUM ke-44 IPU, baik melalui Dr. Fadli Zon sebagai salah satu anggota komite tersebut atau melalui anggota komite lainnya.

IPU juga memiliki Komite *Human Rights of Parliamentarians* yang juga hirau terhadap masalah demokrasi dan HAM yang bisa memberikan dampak pada anggota parlemen dari negara-negara lainnya. CRPH sebenarnya dapat membawa kasus ini pada SiUM ke-44 AIPA sebagai lembaga legislatif konstitusional terpilih namun kudeta oleh militer. Dr. Fadli Zon juga menyarankan CRPH untuk bersurat ke IPU di Jenewa untuk menyalurkan masalah ini kepada parlemen anggota komite HAM dan Demokrasi lainnya.

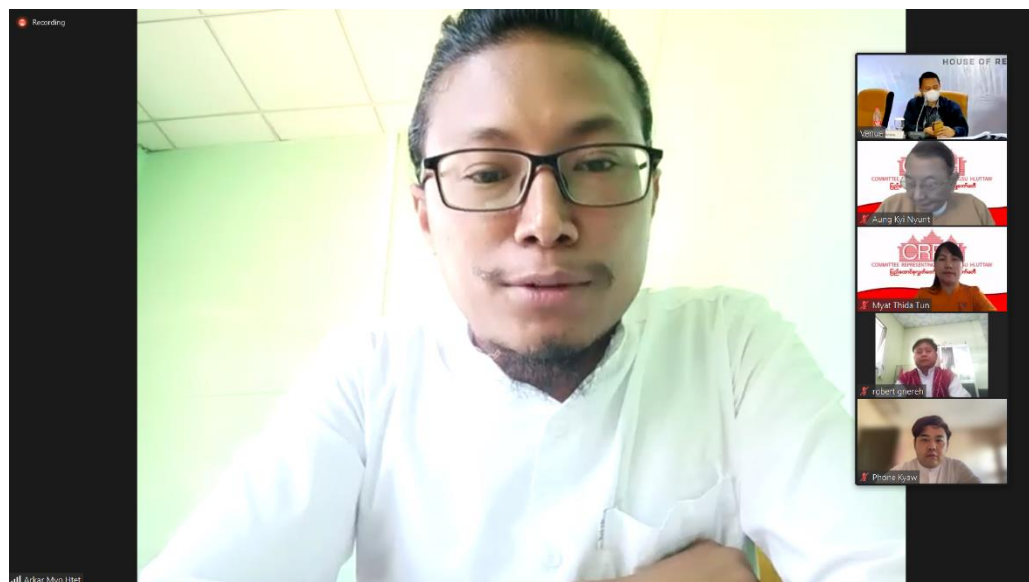


Dr. Fadli Zon berbagi pengalamannya mengenai diskusi yang dikakukannya bersama Sekjen PBB terdahulu, Koffie Annan pada 2017 tentang transformasi demokrasi dan transisi militer. Disampaikan bahwa Koffie Anan memberikan saran, yang dituangkannya dalam laporan rekomendasi tahunan bahwa perlu dilakukan secara jauh

transformasi transisional dari rezim militer ke rezim masyarakat sipil yang demokratis.

Dijelaskan bahwa benar Indonesia, pernah mengalami hal ini di tahun 1998. Indonesia mengalami transisi yang sangat lancar dari kekuasaan militer ke kekuasaan yang benar-benar demokratis. Dan Indonesia masih memiliki fraksi militer dalam parlemennya hingga 2004. Dibutuhkan transisi selama 5 tahun di parlemen, dengan masih adanya fraksi militer, sampai Indonesia benar-benar dapat melaksanakan pemilu yang demokratis dengan sistem multi partai. Dr. Fadli Zon berharap pengalaman ini dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi Myanmar.

#### 10) Pertanyaan/Pernyataan 8: (Anggota CRPH - Arkar Myo Htet)



Arkar Myo Htet menjelaskan bahwa CRPH telah berupaya mengajukan diri hadir dalam SIUM ke-42 AIPA, namun belum dapat diakui sebagai perwakilan Myanmar. CRPH melalui Komite relasi internasionalnya tetap mengupayakan yang terbaik untuk berhubungan dengan anggota parlemen internasional. Parlemen Prancis telah mengeluarkan mosi untuk mengakui keberadaan NUG, tanpa keberatan sama sekali dari seluruh anggotanya. Majelis rendah Parlemen Prancis pada tanggal 22 dan 23 Februari ini melakukan voting untuk mengakui NUG. Menteri Luar Negeri NUG telah mengajukan ke sejumlah negara lainnya seperti Norwegia, Prancis, Korea Selatan dan Jepang untuk izin membuka

perwakilan di negara-negara tersebut. CRPH oleh karenanya juga ingin mengajukan izin untuk membuka perwakilannya di Indonesia untuk mewakili kepentingan rakyat Myanmar dan memberikan informasi terkini mengenai situasi di Myanmar.

### 11) Tanggapan (*Chair of the International Relations Committee of CRPH - Myat Thida Tun*)

Myat Thida Tun menyampaikan terima kasih atas saran yang diberikan Dr. Fadli Zon untuk menghubungi Komite HAM dan Demokrasi IPU serta Komite HAM untuk Anggota Parlemen, dan akan menindaklanjuti saran tersebut. Myat Thida Tun menjelaskan bahwa CRPH sebenarnya telah menghubungi Komite HAM untuk Anggota Parlemen dan melakukan pertemuan dengan mereka serta melakukan *hearing* dan evaluasi hak-hak anggota parlemen untuk menyuarakan masalah ini.

### 12) Tanggapan (Perwakilan CRPH - Tin Ko Ko O)



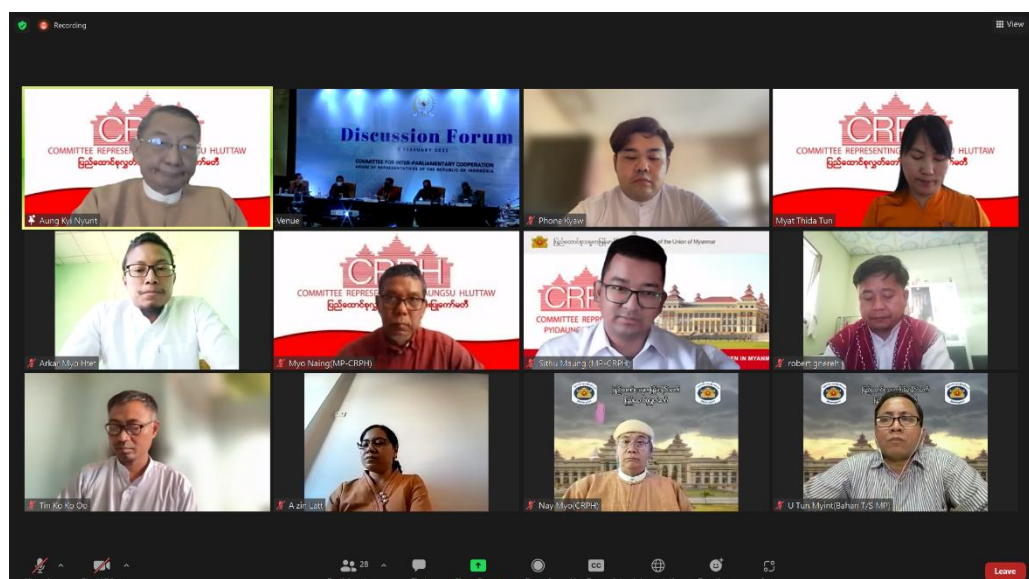
Tin Ko Ko O mengakui bahwa transformasi demokrasi dari penguasaan militer yang dialami Indonesia merupakan contoh yang baik dan pelajaran yang berharga serta inspirasi besar bagi Myanmar. Namun ada hal yang sangat berbeda, yaitu terkait kemauan dan mekanisme militer untuk meninggalkan kekuasaan politiknya. Diakui oleh Tin Ko Ko O, militer Myanmar tidak bersedia meninggalkan kekuasaannya.



### 13) Tanggapan (*Chair of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw - CRPH - Aung Kyi Nyunt*)

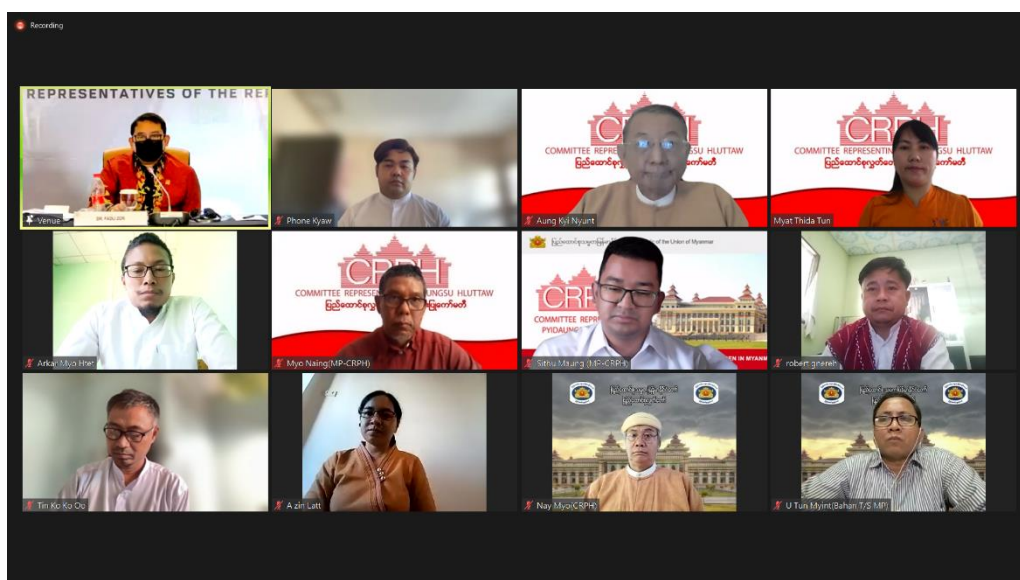
Aung Kyi Nyunt mewakili CRPH setuju dengan saran yang disampaikan oleh Koffie Anan dalam laporan rekomendasinya bahwa militer Myanmar harus ditransformasi pada saat itu. Oleh karenanya CRPH bersama NUG atas nama rakyat membentuk kekuatan pertahanan rakyat untuk mendesak militer mengembalikan kekuasaan pada kontrol sipil. Tujuan militer oleh karenanya seharusnya tidak politis. Tugas utama militer seharusnya untuk melindungi rakyat dan negara. Tujuan utama CRPH untuk mewujudkan negara federal yang demokratis. Agar sistem militer yang ada saat ini tidak lagi berjalan dan Myanmar dapat melakukan transformasi menyeluruh.

Hal yang ironis adalah, sementara militer Indonesia bersedia meninggalkan kekuasaan politiknya secara sadar karena merasa lebih utama menempatkan kepentingan rakyat Indonesia sebagai prioritas. Namun Militer Myanmar tidak ingin melakukan hal yang sama karena begitu menikmati kekuasaan politik dan ingin menamkan pengaruhnya di berbagai sektor, termasuk ekonomi untuk menciptakan surga bagi kelompok dan keluarganya. CRPH dan NUG telah mempelajari secara detail pengalaman inspirasional yang dialami Indonesia terkait transformasi militernya dan berusaha belajar dan mengimplementasikan yang terbaik dari hal tersebut.



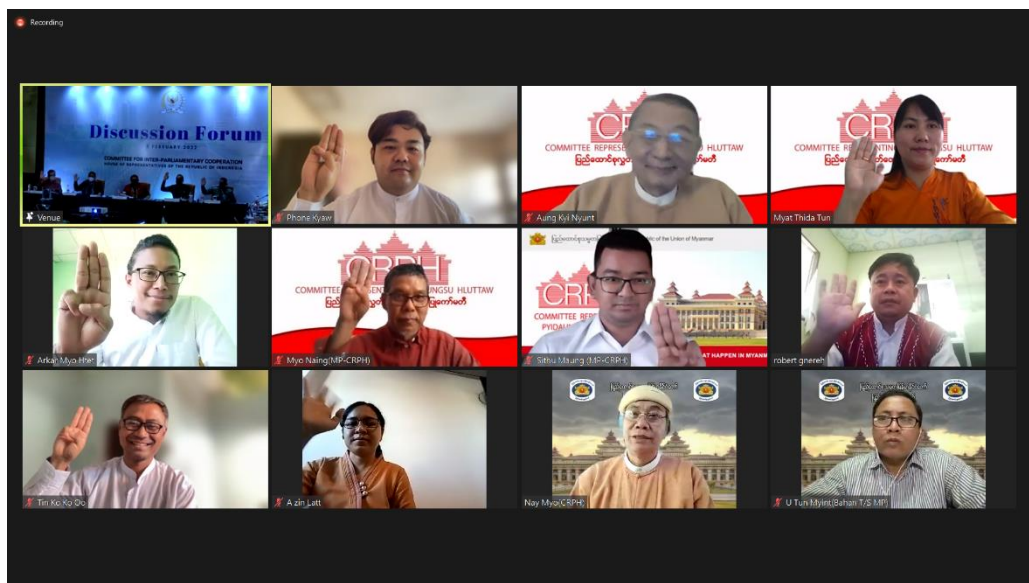
Terkuat etnis minoritas termasuk Rohingnya, NUG dengan Kementarian HAM nya telah menerbitkan kebijakan terkait Rohingnya. CRPH dan NUG berencana untuk menerapkan aturan dan mengamandemen hukum yang ada saat ini untuk menjamin hidup dan kebebasan etnis minoritas dan akan berusaha memuat perlindungan ini dalam konstitusi Myanmar. Ambisi ini tentu membutuhkan dukungan teknis, psikologis dan jika memungkinkan dukungan finansial dari Indonesia. Aung Kyi Nyunt menyebutkan pertemuan hari ini merupakan awal, pintu pertama kerjasama di masa mendatang dan sangat berharap diadakannya pertemuan berikutnya sebagai tindak lanjut dari diskusi hari ini.

#### 14) Tanggapan (Ketua BKSAP- Dr. Fadli Zon)



Dr. Fadli Zon menjelaskan bahwa dwifungsi militer Indonesia mendapatkan momentumnya ketika rakyat menunjukkan tekad yang besar terhadap demokrasi. Masyarakat Indonesia menciptakan situasi yang mendesak militer untuk menanggalkan kekuasaan dan memisahkan diri dari dunia politik. Transisi militer terjadi saat itu juga, didasari oleh keinginan rakyat yang kuat dan momentum. Meskipun Myanmar menghadapi situasi yang sedikit berbeda, namun Myanmar telah berhasil melaksanakan pemilunya yang demokratis tahun 2015, meskipun masih dibayangi dengan kekuasaan militer. Dan kembali berhasil melaksanakan pemilu yang demokratis di 2020 yang kemudian

dianulir melalui kudeta oleh militer. Namun Dr. Fadli Zon percaya, rakyat Myanmar akan segera memutuskan masa depan Myanmar dan percaya CRPH akan mampu memperjuangkan hal tersebut mengingat Anggota CRPH dipilih langsung oleh rakyat Myanmar. Dr. Fadli Zon berharap CRPH dapat terus memberikan informasi terkini mengenai situasi di Myanmar karena mungkin parlemen Indonesia dapat mengupayakan sesuatu terkait isu Myanmar ini di SIUM ke-44 IPU. Harapan Indonesia agar isu Myanmar dapat didiskusikan di Komite HAM dan Demokrasi IPU serta Komite HAM untuk anggota parlemen dapat turut mengangkat isu ini.



**Rabu, 9 Februari 2022**

***Follow-up Discussion***

Dalam rangka tindak-lanjut dari Dialog antara BKSAP dan CRPH pada tanggal 8 Februari 2022, WFD mengadakan pertemuan bertajuk *Follow Up on the DPR RI and CRPH Bilateral Dialogue: Situational Update on Democracy and Peace in Myanmar*" guna menambah pengetahuan dan wawasan (insight) Sekretariat BKSAP dan Tenaga Ahli dalam penyusunan *Report of the Meeting Between BKSAP and CRPH*.

Pertemuan ini dimoderatori oleh Lina Alexandra, Senior Researcher dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dengan menghadirkan narasumber, yaitu :

- Charles Santiago MP, Chairman ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang juga Member of Malaysian Parliament untuk menyampaikan paparan bertajuk *Parliaments' Role in Strengthening Bilateral Cooperation to Respond Myanmar's Humanitarian Crisis*
- Adelina Kamal, Former Executive Director of ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) untuk menyampaikan paparan bertajuk *Ensuring the Continuity of Regional Humanitarian Effort in Crisis Situations: A Case of Myanmar*



### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pertemuan antara Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Parlemen Myanmar di Pengasingan *Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH)* dalam bentuk diskusi interaktif (*friendly talk*) secara daring (*virtual*) telah terlaksana dengan lancar dan sukses pada tanggal 8 Februari 2022.
2. Kegiatan pertemuan BKSAP – CRPH tersebut dapat terlaksana berkat dukungan teknis dari *Westminster Foundation for Democracy (WFD)* dan komunikasi dengan Sekretariat Tetap *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*
3. Dalam pertemuan BKSAP – CRPH tersebut, dari BKSAP dipimpin oleh Ketua BKSAP didampingi para Wakil Ketua dan Anggota BKSAP dengan jumlah total delegasi sebanyak 13 Anggota dari berbagai Fraksi. Sedangkan dari CRPH dipimpin oleh Chairman dengan total delegasi sebanyak 10 Anggota.
4. CRPH sangat mengapresiasi kesediaan BKSAP untuk menerima permintaan pertemuan tersebut dan mengharapkan agar CRPH dapat dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan parlemen di kawasan termasuk Sidang Umum ke-144 IPU di Bali
5. CRPH mengharapkan dukungan BKSAP agar bantuan kemanusiaan dapat langsung disampaikan kepada *National Unity Governmet of Myanmar (NUG)* bukan melalui Junta Militer, agar bisa langsung dialokasikan kepada masyarakat sipil.
6. CRPH menyampaikan bahwa saat ini semua masyarakat sipil adalah pengungsi (*refugee*), tidak hanya etnis Rohingya namun juga semua minoritas etnik khususnya di daerah perbatasan Thailand dan Kamboja
7. BKSAP dapat menerima masukan dari CRPH namun keputusan untuk melaksanakan langkah-langkah lebih lanjut BKSAP perlu melaporkan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPR RI guna mendapatkan persetujuan.

8. Dari sepuluh (10) negara Anggota AIPA, baru BKSAP yang mengadakan pertemuan dengan CRPH sejak terjadinya kudeta 1 Februari 2021.
9. BKSAP menegaskan bahwa salah satu kunci penyelesaian krisis di Myanmar adalah dilaksanakannya Lima Konsensus ASEAN (*Five points consensus ASEAN*) oleh Junta, sedangkan hingga terselenggaranya pertemuan BKSAP – CRPH ini, Junta Militer belum melaksanakan satu pun poin dari lima konsensus yang telah disepakati oleh ASEAN pada April 2021 itu.

## **B. Saran**

1. BKSAP DPR RI perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna mendapatkan pandangan yang berimbang tentang isu Myanmar dan posisi CRPH dari sisi Pemerintah
2. BKSAP DPR RI perlu menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPR RI sebelum menindaklanjuti hasil pertemuan dengan CRPH tanggal 8 Februari 2022
3. BKSAP DPR RI perlu menyusun langkah strategis ke depan terkait Keketuaan DPR RI di AIPA ke-44 dan Keketuaan DPR RI di IPU ke-144 agar Isu Myanmar dapat diakomodir dalam pembahasan di forum internasional.

## IV. PENUTUP

### A. Ucapan Terima Kasih

BKSAP menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretariat Tetap ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) atas perannya dalam menjembatani komunikasi antara BKSAP dengan CRPH, dan kepada Westminster Foundation for Democracy (WFD) atas dukungan dan kerja samanya hingga pertemuan BKSAP - CRPH dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, termasuk Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI atas dukungannya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses

### B. Lampiran

Laporan ini dilengkapi dengan informasi tambahan sebagai lampiran berupa:

- Report of the Meeting
- Press Release
- Term of Reference (TOR)
- Dokumentasi foto selama kegiatan

Demikian Laporan Delegasi ini disusun dan disampaikan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Delegasi. Delegasi mengharapkan Laporan ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,                      Februari 2022

a.n Delegasi  
Ketua Delegasi



**Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc**

A-86



# KETERANGAN LAMPIRAN

- **REPORT OF THE MEETING**
- **PRESS RELEASE**
- **TERM OF REFERENCE**
- **DOKUMENTASI KEGIATAN**





**R E P O R T**  
**BKSAP DPR-RI and CRPH Bilateral Dialogue:**  
**Situational Update on Democracy and Peace in Myanmar**

**Tangerang & Naypyitaw (Hybrid Set-Up)**  
**8-9 February 2022**  
**14:00 – 16:00 (GMT+7)**

---

**I. Background**

The Committee of Inter-Parliamentary Cooperation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (BKSAP DPR-RI) attended a Bilateral Dialogue dialogue with the Committee Representing the *Pyidaungsu Hluttaw* (CRPH) of Myanmar, virtually on the 8 of February 2022, 14:00 hours Jakarta time. The Bilateral Dialogue dialogue was initiated by the CRPH with the assistance from the Westminster Foundation for Democracy (WFD) and the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). The dialogue was part of the implementation of the parliamentary diplomacy by BKSAP-DPR RI, an Indonesian Parliamentary Body tasked with diplomacy, a strategic function aside from its traditional one such as legislation, supervision and budgeting. Parliamentary diplomacy is aimed to strengthen Indonesia's foreign policy.

The CRPH was officially formed on the 5<sup>th</sup> of February 2022 during an emergency session of the Myanmar's parliament which was held through a video conference following a military coup on the 1<sup>st</sup> of February, on the same year. The CRPH consists of 15 members of parliament which were tasked to carry forward the parliamentary functions mandated by the people of Myanmar, despite crackdown from the military. The vision of the CRPH is; 1) To end military dictatorship 2) To ensure the unconditional release of all unlawfully arrested detainees, including President U Win Myint and State Counselor Daw Aung San Suu Kyi 3) To achieve full-fledged democracy and 4) To withdraw the 2008 constitution and draft a new constitution based on the federal system.

BKSAP DPR-RI were represented by Hon. Dr. Fadli Zon as the chairman accompanied by Hon. Dr. Sihar Sitorus, Hon. Dr. Mardani Ali Sera, Hon. Hafisz Thohir and Hon. Putu Supadma Rudana as the vice chairmen of BKSAP DPR-RI. Members of BKSAP DPR-RI also attended the event, namely; Hon. Mr. Sofyan Tan, Hon. Mr. Naszirul Falah Amru, Hon. Mr. Darul Siska, Hon. Mr. Kamrussamad, Hon. Mrs. Ratih Megasari Singkaru, Hon. Mr. Didi Irawadi Syamsuddin, Hon. Mr. M Syahrul Aidi Maazat, Hon. Mr. Primus Yustisio and Hon. Mrs. Ema Umিয়yatul Chusnah. While the CRPH was represented by H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt, Hon. Mr. Tun Myint, Hon. Mr. Nay Myo, Hon. Mr. Myo Naing, Hon. Ms. Myat Thida Htun, Hon. Mr. Robert, Hon. Mr. Tin Ko Ko Oo, Hon. Mr. Arkar Myo Htet, Hon. Mr. Win Ko Oo, Hon. Mr. Phone Kyaw

and Hon. Dr. A Zin Latt. BKSAP DPR-RI is the first parliament of ASEAN Member States that communicated bilaterally with the CRPH.

## II. Objectives

The Bilateral Dialogue is aimed to initiate communication between BKSAP DPR-RI and the CRPH, particularly in relation to the crisis in Myanmar. The objectives are:

1. To deepen understanding of BKSAP DPR-RI on recent updates to the crises in Myanmar
2. To explore potential cooperation between BKSAP DPR RI and CRPH
3. To designate focal points from both BKSAP DPR RI and CRPH for further communication and correspondence, to follow up potential cooperation beyond the dialogue

## III. Agenda

<b>“BKSAP DPR RI and CRPH Bilateral Dialogue: Situational Update on Democracy and Peace in Myanmar” Tuesday, 8 February 2022   14.00 - 16.00 (GMT+7)</b>
<b>Description</b>
<p><b>Opening Remarks and Introduction</b> <i>Remarks from Chair of BKSAP DPR RI to welcome all participants. Roll call of all MPs participating in the dialogue by DPR RI.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hon. Dr. Fadli Zon, SS, Msc - Chair, Inter-Parliamentary Cooperation Committee   DPR RI</li> </ul> <p>Time allocation: 15 minutes</p>
<p><b>CRPH Introduction, Situation Updates, and Express Intentions</b> <i>Roll call of all MPs participating in the dialogue by CRPH. The CRPH to share the economic and political instability in Myanmar after the military takeover on 1 February 2021 that forced Myanmar into a crisis. Furthermore, CRPH will also share their concerns around:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The situation of humanitarian aid and COVID-19 response in Myanmar</i></li> <li>2. <i>The establishment and coordination between interim democratic opposition</i></li> </ol> <p><i>On top of that, CRPH to express the intentions of the request of the meeting.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt, Chairman of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw   CRPH</li> <li>● Hon. Mr. Tin Ko Ko Oo, Secretary of the CRPH International Relations Committee   CRPH</li> </ul> <p>Time allocation: 30 minutes</p>
<p><b>Interactive Dialogue</b></p>

*The Indonesian Parliament to share their general views on the Myanmar crises and followed by an interactive dialogue on the follow up plan to support CRPH in responding Myanmar's humanitarian and political crisis.*

- Hon. Dr. Mardani Ali Sera, Vice Chair of the House Committee for Inter-Parliamentary Cooperation | DPR RI

Time allocation: 60 minutes

### **Closing Statements**

*Closing statement from Vice Chair of BKSAP DPR RI and Chair of CRPH delegate to close the session.*

- Hon. Dr. Mardani Ali Sera, Vice Chair of the House Committee for Inter-Parliamentary Cooperation | DPR RI
- H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt, Chairman of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw | CRPH

Time allocation: 15 minutes

## **IV. The Meeting**

The proceedings of the meeting are as follows:

In his opening remarks Hon. Dr.Fadli Zon conveyed the importance of realizing a stable, secure and peaceful Southeast Asia, as the main key to achieve sustainable development goals in the region. The spill-over effect from the crisis in Myanmar that has been going on for a year, would further hinder the attainment of sustainable development and even destabilized the region. From a political and security point of view, as Indonesia's strategic environment, the stability, peace and security of the Southeast Asia are of paramount importance. Which is why when the coup took place, Indonesia was among the first countries responded to the situation and demanded the Junta to restore democracy, exercise self-constraint and ensure the safety of the people of Myanmar.

According to Hon. Dr.Fadli Zon, the Indonesian House of Representatives represented by the Committee of Inter-Parliamentary Cooperation which he chaired, held a press conference condemned the coup and stressed that it was a major setback for the development of democracy and it would further destabilize the region. BKSAP DPR-RI also share the same concerns with the Government of Indonesia that the safety and well-being of the people of Myanmar is a priority and that it only can be ensured by restoring democracy which strengthen by the rule of law, good governance and a constitutional government.

Further, Hon. Dr. Fadli Zon also mentioned that the BKSAP DPR-RI also supported the Indonesian government role as bridge builder in resolving the Myanmar crisis, which should be carried out in prudence and committed to the obligation to fully implement shared principles and values of ASEAN Charter, including democracy, respect for human rights, good governance, rule of law and constitutional government. BKSAP DPR-RI also encourage the government of Indonesia to be consistent in urging the Tatmadaw to immediately implement the five-point consensus of ASEAN.

In the context of parliamentary diplomacy, Hon. Dr. Fadli Zon deliberated that BKSAP DPR-RI has tried its best to actively voiced on the importance of the immediate implementation of the Five-Point Consensus agreed upon by ASEAN regional leaders in 2021, through several parliamentary forums, among others, the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), the Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) and the Inter-Parliamentary Union (IPU). One particular example that he pointed out during his remarks is at the Political Committee meeting of the 42nd AIPA General Assembly in 2021. At that meeting, BKSAP DPR-RI urged for the ASEAN Parliaments to proportionally place the principle of non-intervention in the human rights context, encouraged fellow AIPA members of parliament to decide on a resolution for the crisis in Myanmar, and the urgency to immediately implement the Five-Point Consensus of ASEAN. However, the effort failed to gain consensus as not all AIPA member parliament agrees.

Prior to the 42<sup>nd</sup> AIPA General Assembly, BKSAP DPR-RI struggled to gain support on its proposal of resolution on the humanitarian situation of the Rohingya people for four consecutive years (2017-2020) in AIPA, but was always hindered by rigid comprehension of the principle of non-interference and consensus-based decision-making mechanism of the AIPA. Based on this experience, BKSAP DPR-RI have learned that any diplomatic efforts related to democracy or human rights agenda in Myanmar through ASEAN or AIPA, may be challenge by the principle of non-interference and current decision-making mechanism. Alternative way has also been tried by BKSAP DPR-RI through putting forward a proposal to reform the decision-making mechanism in AIPA into voting when it comes to urgent matters in the region, but this effort is also unsuccessful as it did not attain support from the majority of AIPA member parliaments.

Nevertheless, Hon. Dr. Fadli Zon in his remarks ensure that although the result of efforts of BKSAP DPR-RI is far from ideal, immediate implementation of the Five-Point Consensus of ASEAN will still be one of the priorities of its parliamentary diplomacy. Closing his remarks, Hon. Dr. Fadli Zon also stressed on the importance of providing indiscriminating humanitarian assistance to all of the people of Myanmar, and that he hoped this Bilateral Dialogue dialogue would be beneficial for the advancement of democracy agenda in Myanmar.



His Excellency Mr. Aung Kyi Nyunt, elected member of the parliament of Myanmar, currently chairman of the CRPH delivered his remarks after Hon. Dr. Fadli Zon. In his remarks H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt expressed appreciation and thanks on behalf of the CRPH to the Indonesian House of Representatives, for its efforts in urging the *Tatmadaw* to immediately implement the Five-Point Consensus of ASEAN, and gather support from the AIPA member parliaments through diplomacy. He felt encouraged and motivated after hearing Dr. Fadli Zon's opening remarks and asked for continued support from the Indonesian House of Representatives for the advancement of democracy in Myanmar.

Vice Chair of BKSAP DPR-RI, Hon. Dr. Mardani Ali Sera then summarized the two opening remarks from Hon. Dr. Fadli Zon and H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt before welcoming other members of parliament to start the interactive discussion session. In his summary Hon. Dr. Mardani Ali Sera emphasized that BKSAP DPR-RI shares the same position with the Government of Indonesia regarding the crisis in Myanmar by highlighting on three things: (1) the safety and welfare of the Myanmar people as a priority; (2) restoration of democracy; (3) the urgency of maintaining regional peace, stability and prosperity and 4) the importance of humanitarian assistance to all people of Myanmar.

Hon. Dr. Mardani Ali Sera also reassures the CRPH that BKSAP DPRI-RI, in its utmost capacity, in the context of parliamentary diplomacy, will continue to stress on the importance of immediate implementation of the Five-Point Consensus of ASEAN in every relevant parliamentary forum. Hon. Dr. Mardani Ali Sera then welcomed if there is other CRPH members who would like to provide some updates on the situation in Myanmar, or to convey comments or question to start the interactive discussion session.

Responding to Hon. Dr. Mardani Ali, H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt argued that he is certain that members of the Indonesian House of Representatives have already heard about the dire situation in Myanmar and how many civilian lives have been lost, so he will not discuss further about it. However, he felt that he needs to stressed on several important matters such as humanitarian assistance for the people of Myanmar, where he strongly suggested that the delivery of such assistance should not involve or made through the *Tatmadaw*. This is because it is feared that the humanitarian assistance will never reach the people of Myanmar. According to H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt, instead of involving the *Tatmadaw* in the distribution of humanitarian assistance, international donors should talk with the National Unity Government (the shadow government formed by opposition to the coup), to ensure that the people of Myanmar would receive it. He also reported that the *Tatmadaw* have completely ignored the insistence from any concerned parties regarding the need to immediately implement the Five-Point Consensus of ASEAN. Therefore, he reiterated that support from various concerned parties for the pro-democracy movement in Myanmar is very much needed.

Indonesia, according to H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt, have long been the center of attention and subject of studies for many pro-democracy movements in Myanmar. This is because Indonesia's history of democracy, where Indonesia was once ruled by a military regime, but succeeded in fully transforming into a democratic country through reform in 1998. Although it must be acknowledged, that there are some specific differences between the Indonesian military and Myanmar. Where at the time of reform, the Indonesian military chose to consciously leave politics while the Myanmar military was not willing to give up all kinds of political and economic privileges that were obtained through their dictatorship. Still, members of CRPH looked up to Indonesia for its experience in the democratic transition, bearing in mind that not all country in Southeast Asia share the same success.

H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt deemed that it is necessary for both side (BKSAP DPR-RI and the CRPH), to establish a formal communication channel, so that cooperation between the two parties in the future can be explored more. Especially, cooperation in terms of moral support, technical support and financial support for the sustainability of the CRPH struggle in upholding democracy in Myanmar. He also conveyed that the CRPH have become fully aware of the Tatmadaw ill treatment to ethnic minority groups in Myanmar, including to the Rohingya people because currently they are experiencing it. Therefore, the NUG together with the CRPH strives to involve all elements of civil society including ethnic minority groups in the current democratic movement. Hence, it is hoped that in the future, when Myanmar has turned into a more democratic federal state, all parties will be better accommodated as citizens.

Despite of the dire situation in Myanmar, the international community, according to H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt, also need to be well informed of the positive development in Myanmar where slowly but sure, more and more territories is liberated by the Myanmar's armed resistance groups such as the People's Defense Force (PDF) and ethnic militias which supports democracy. He hoped that BKSAP DPR-RI would voice the situation in Myanmar in the upcoming 144th IPU Assembly as well as in the next AIPA General Assembly, which are hosted by Indonesia. It is important to attain support from fellow parliamentarians in the Southeast Asian region.

Hon. Daw Myat Thida Htun of the CRPH International Relations Committee also shares the same concerns with H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt and reiterated that both the 144<sup>th</sup> IPU Assembly and the AIPA General Assembly that will be held in Indonesia are the suitable parliamentary forum to gather support for the democracy movement in Myanmar. Which is why Indonesia's strong support during those two events, is highly expected.

Hon. Dr. Sihar Sitorus one of the Vice Chair of BKSAP DPR-RI conveyed his concerns over the issue of COVID-19 Pandemic in Myanmar, particularly with the hardships that is now faced by the people of Myanmar. He underlined that solidarity between countries is required to effectively defeat this virus. No one is safe until everyone is,

and only through solidarity can we defeat the pandemic once and for all. In the context of Myanmar, Hon. Dr. Sihar Sitorus explained that BKSAP DPR-RI will continue to support the Government of Indonesia in their effort to provide humanitarian assistance during this pandemic, in the form of Indonesian-produced medical equipment including KN95 masks, medical gloves, and Personal Protective Equipment (PPE). BKSAP DPR-RI will also encourage the Indonesian Government to continue their engagement with the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) to provide assistance to tackle the COVID-19 pandemic.

According to Hon. Dr. Sihar Sitorus, the Indonesian Parliament has been consistently voicing out concern on the COVID-19 situation and health challenges in Myanmar at inter-parliamentary fora. Further, he also elaborated on the need for BKSAP DPR-RI to urge all parties to facilitate the equitable, safe and unhindered delivery and distribution of COVID-19 vaccinations in areas of conflict, as well as ensure the safety and protection of medical and humanitarian personnel, their equipment, transport and supplies, in order to facilitate COVID-19 vaccinations, medicines and treatments. BKSAP DPR-RI will also support the effort to promote a more visible and enhanced role of ASEAN in supporting the humanitarian situation of refugee and displaced persons, including from Rakhine State, through providing humanitarian assistance, assisting the repatriation process and promoting sustainable development.

Hon. Putu Supadma Rudana expressed his views on the situation in Myanmar, particularly in the context of Rohingya refugees. According to Hon. Putu Supadma Rudana, Indonesia's efforts in the handling of refugees and asylum seekers have been extra-miles. As a non-party state to the Refugee Convention 1951 and its Protocol 1967, Indonesia's actions have gone beyond its responsibility, especially in rescuing and temporarily hosting more than 13.000 refugees from more than 49 countries.

Moreover, Indonesia's efforts according to Hon. Putu Supadma Rudana, are rooted within the commitment to humanity that during emergency situation, the Government prioritizes the safety of refugees, especially the ones that are vulnerable, including Rohingya refugees. Hon. Putu Supadma Rudana mentioned that In 2021, Indonesia once again rescued a boat of 81 Rohingya refugees from emergency situation. In close coordination with UNHCR and IOM, the Government have managed to mobilize those refugees to a safe and sustainable community housings in Medan, North Sumatra, Indonesia. The Government also successfully conducted emergency response that is adherent to the COVID-19 prevention protocols – while rescuing and mobilizing.

Hon. Supadma Rudana emphasized that actions by the Government of Indonesia in the handling of refugees and asylum seekers are based on several principles:

1. Indonesia remains consistent and extra-miles in implementing the non-refoulment principle, beyond its responsibility as a non-party state to the Refugee Convention.

2. Indonesia takes into account the safety of refugees with specific needs, especially pregnant women, children, persons with disabilities, and older persons.
3. Indonesia continues to push for the leadership of UNHCR and IOM, as the mandated organizations, in the handling of refugees.
4. Indonesia remains consistent in pursuing for the implementation of responsibility sharing by countries who are parties to the Refugee Convention, especially through resettlement.
5. Indonesia remains supportive to the efforts of solving the root causes in origin states to enable the creation of safe and dignified environment that allows voluntary repatriation.

Hon. Putu Supadma Rudana reiterated BKSAP DPR-RI support toward the Government's efforts to provide safe and humane reception conditions to refugees as well as access to international protection, including asylum procedures. He then concluded his view by expressing hope that countries in the Southeast Asia will come together on the principles of solidarity and responsibility sharing to address the issue of irregular movement at sea as well as address the humanitarian needs of Rohingya Refugees.

One of the members of BKSAP DPR-RI, Hon. Ratih Megasari Singkaru, expressed her view regarding the complicity within the ASEAN in responding to the crisis in Myanmar. According to her, it is undeniable that members of ASEAN countries are facing asymmetric foreign policy orientations and divided views on the Myanmar crises. She emphasized that as the Indonesia House of Representatives and CRPH is currently building a bilateral engagement, there is a need for us to build more multilateral collaboration and coordination especially among our ASEAN friends who share similar views. As the consequence, there is a need to expand talk regarding the issue of the crisis in Myanmar without harming the unity and centrality of ASEAN.

Responding to views expressed by vice chairs and member of BKSAP DPR-RI, H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt answered that with regard to the COVID-19 pandemic, as health services in Myanmar is currently unable to operate regularly due to the military crackdown, the people of Myanmar is relying upon peer-to-peer support. However, vaccines were able to be distributed in some liberated territories. H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt further explained that many people in Myanmar now are considered as refugees as they fled military persecution. Members of the opposition parties such as NLD and from other party as well as minority ethnic groups are also among them. Many of these people were also stranded in the border of India and Thailand. Against such condition, H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt requested the Indonesian House of Representatives to encourage the Government of Indonesia to ask the Government of Thailand and India to assist those people to cross the border. He went on to say that the NUG with the support from CRPH will try to carry on, with its utmost effort to perform in this year, as they are now the beacon of hope for the people of Myanmar. According to H.E. Mr.

Aung Kyi Nyunt, international or regional parliamentary events may be the most suitable means of expanding talks on the crisis in Myanmar, bearing in mind that Indonesia will be the host of 144<sup>th</sup> IPU Assembly this year, and the 43<sup>rd</sup> AIPA General Assembly next year.

Responding to H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt particularly regarding to the upcoming IPU and AIPA events, Hon. Dr. Fadli Zon suggested that the CRPH could write a letter to the secretariat of IPU or AIPA, or write directly to the Committee of Democracy and Human Rights and the Committee for Human Rights of Parliamentarians in the IPU, and requested for a special event to discuss the situation in Myanmar. Hon. Dr. Fadli Zon also mentioned that after his visit to Cox Bazaar, he met with former UN Secretary General Koffi Anan in 2018, and discussed about democratic transition in Myanmar. One of the highlighted topics of discussion was the report that Koffi Anan wrote, where he suggested a military transformation was one of the keys to the transition in Myanmar. Hon. Dr. Fadli Zon agreed on this, as according to him Myanmar can learn from Indonesia's experience during the 1998 reform. He realized that there may be differences between the situation in Indonesia back then, with the situation in Myanmar now, especially regarding the military. Hon. Dr. Fadli Zon explained that when the 1998 reform has been successful in over throwing the military regime, the transition of power in the parliament was quite smooth as the military is given 5 years before they completely end their role in Indonesian parliament. Hon. Dr. Fadli Zon suggested that maybe Myanmar can learn from that experience.

H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt responded to the Indonesia's experience that Hon. Dr. Fadli Zon shared. He viewed that there is a major difference between the Indonesian military and Myanmar's military, particularly in how they responded to people's will of transition to democracy. However, he reiterated that Indonesia remains as inspiration for Myanmar's transition to democracy. In the future, should the democratic movement prevail, and Myanmar gave become a federal democracy state, Myanmar will reform its military into federal armed forces which main objective is to protect the people of Myanmar.

Hon. Dr. Mardani Ali Sera welcomed if there are other members of the CRPH who wanted to express their thoughts or concerns in this interactive discussion session. A member of CRPH from Myanmar's ethnic minority groups, named Robert, responded by sharing his perspective as minority, regarding to the situation in Myanmar. According to Robert, the minority ethnic groups of Myanmar are no stranger to military violence as they are constant subject of such ill treatment from time to time, even prior to the crisis. Which is why they are now united under the NUG and CRPH with the common goals to eradicate military dictatorship. He also asked for Indonesia to continue to assist Myanmar's refugees especially the minority ethnic groups.

Another representative of Myanmar's ethnic minority groups, named Situ Maung expressed his views. Being a Muslim member of the CRPH, he ensured that in the



future, all elements of the people of Myanmar will be involved and taken into account in every important decision related to the new federal democracy state of Myanmar, including the Rohingya. The NUG together with the CRPH will draft a policy in how to handle the Rohingya issue. He emphasized that the *Tatmadaw* often utilizes religious issues in Myanmar as means of dividing the people so that the people will not be united against the military. The CRPH together with NUG will also amend the old constitution of Myanmar. Arkar Mayo Htet member of the CRPH added that international recognition for NUG has increased significantly, with the French parliament is under deliberation of law which will acknowledge the NUG. He also mentioned that foreign investors in Myanmar are beginning to consider opening communication with the NUG. He also requested To BKSAP DPR-RI support for the NUG to have a representative office in Indonesia so that support will be easier to gather.

Hon. Dr. Mardani Ali Sera concluded the discussion and reiterate that it is an honor to be able to have discussion with the CRPH. He mentioned that important points in the dialogue will be discussed further within the Indonesian House of Representatives for future recommendation. He also hoped that the dialogue will not be the last. Closing the session, he wished everyone good health and success in future endeavor.

## **V. Conclusion**

1. Overall, from a technical perspective, it can be concluded that the bilateral dialogue between the DPR-RI BKSAP and the CRPH which took place virtually, ran well without any technical hindrance. Despite language barrier at the beginning, but the problem was resolved and the discussion went smooth.
2. Substantially, the dialogue has succeeded in providing an up-to-date and comprehensive picture of the situation in Myanmar to the chairmanship and members of the BKSAP DPR-RI. It is an important input for the implementation of the BKSAP DPR-RI parliamentary diplomacy in the future, particularly regarding to the crisis in Myanmar in future international and regional events hosted by BKSAP DPR-RI such as the 144<sup>th</sup> IPU Assembly, or the 43<sup>rd</sup> AIPA General Assembly.
3. Based on the matters discussed and response from both BKSAP DPR-RI and the CRPH, there is potential for continuity in terms of communication and correspondence between the DPR RI BKSAP and the CRPH. It can also further develop into a more advanced inter-parliamentary cooperation, should the democratic transition in Myanmar be successful in the future.

## **VI. Recommendations**

1. BKSAP DPR RI can communicate the matters discussed in this bilateral dialogue to the relevant commissions and then, if possible, can be further

communicated to the Indonesian government in accordance with the suitable fields of the commissions.

2. BKSAP DPR RI can initiate dialogue on Myanmar issue with other AIPA Member Parliaments, and the AIPA Observers (ASEAN Dialogue Partners). Through the dialogue, parliament can take ownership on this issue with a view to make a formal presence of this issue within AIPA.
3. BKSAP DPR RI can initiate a regional or international inter-parliamentary caucus with like-minded parliaments, to follow up on the matters discussed in this dialogue.
4. BKSAP DPR RI to discuss further the role of parliament to address the humanitarian situation, as well as ways and means for the parliament to gather and send humanitarian assistance to Myanmar.
5. BKSAP DPR RI can start dialogue with ASEAN on the alternative ASEAN Mechanism, such as a Troika, to monitor the Five Point Consensus and dealing with the immediate crisis within ASEAN.



# Siaran Pers

Badan Kerja Sama Antar-  
Parlemen (BKSAP)  
DPR RI

*Sekretariat:*

Ged. Nusantara III, Lt. 4  
Jl. Jend. Gatot Subroto  
Jakarta 10270  
Indonesia

*Website:*

<http://ksap.dpr.go.id/>

*Twitter:*

[@bksapdpri](https://twitter.com/bksapdpri)

*Instagram:*

[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

*YouTube:*

[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP DPR RI)

**BKSAP** adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:  
021-5715814  
[biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

## CRPH sampaikan situasi terkini Myanmar kepada BKSAP DPR RI

**Tangerang Selatan, 8/02/2022** - BKSAP DPR RI melakukan dialog dengan *Committee Representing Pyadaungsu Hluttaw* (CPRH) pada tanggal 8 Februari 2022. Dialog merupakan permintaan dari CRPH melalui ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA).

Dalam dialog tersebut, CRPH menyampaikan perkembangan-perkembangan terbaru di dalam negeri Myanmar setelah satu tahun pemerintahan diambil-alih Junta Militer. Berbagai isu yang dibahas antara lain mengenai krisis COVID-19, pengungsi Rohingya dan etnis minoritas lainnya, serta upaya pemulihan demokrasi.

Dalam dialog tersebut, pimpinan BKSAP menyampaikan bahwa posisi parlemen sejalan dengan posisi Pemerintah RI. BKSAP menekankan pada implementasi *Five Point Consensus*. Dibutuhkan kolaborasi antara berbagai *stakeholders* baik di dalam negeri Myanmar maupun di kawasan Asia Tenggara.

“Dalam hal ini, kami sudah berkali-kali membawa isu Myanmar ini ke berbagai forum antar parlemen sebagai upaya mencari solusi. Tetapi untuk di AIPA, selalu terbentur pada *principle of non-interference and respect toward state sovereignty* di ASEAN Charter. Padahal selayaknya prinsip tersebut dimaknai secara paralel dengan prinsip ASEAN lainnya terutama penghormatan pada Hak Asasi Manusia, penegakan demokrasi dan penegakan hukum,” demikian disampaikan Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon.

Sebagai tindak lanjut, BKSAP DPR RI akan mendiskusikan kembali secara internal hasil-hasil dialog ini. “Penting bagi kami untuk mendengar dari berbagai pihak mengenai isu Myanmar karena DPR RI akan memegang kepemimpinan di AIPA tahun depan. Sesuai amanat tatib, BKSAP di posisi memberikan masukan agar DPR RI dapat merumuskan *well-informed decision* terkait isu-isu antar parlemen,” ungkap Fadli Zon.

Fadli Zon menegaskan BKSAP secara konsisten akan menyuarakan isu Myanmar untuk menuju pemulihan demokrasi yang berkelanjutan dan inklusif. Parlemen dalam hal ini menempati posisi pengawasan termasuk atas implementasi ASEAN Charter. Beberapa opsi dapat dipertimbangkan untuk memecah kebuntuan dalam mencapai consensus. Parlemen dapat mempertimbangkan usulan untuk merevisi ASEAN Charter dan meninjau kembali kemungkinan penerapan ASEAN minus X formula di luar isu-isu ekonomi.

# TERMS OF REFERENCE

BKSAP DPR RI and CRPH Bilateral Dialogue: Situational Update on Democracy and Peace in Myanmar

Tangerang & Naypyitaw (Hybrid Set-Up) | 8-9 February 2022 | 14.00 - 16.00 (GMT+7)

The Westminster Foundation for Democracy (WFD) is the UK public body dedicated to supporting democracy around the world. WFD works in partnership with political parties, parliaments, and civil society organisations to create fairer and more inclusive, accountable, and transparent political system. WFD strengthens the capacity of these key democratic institutions, helping ensure they have the systems, knowledge, and skills to perform effectively. WFD also fosters improved democratic processes, bringing together individuals and institutions, and encouraging them to work together to solve concrete problems, applying democratic values and principles.

In Indonesia, WFD works closely with the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in a multitude of high-level programming. Among others, WFD supports the Inter-Parliamentary Cooperation Agency (BKSAP) of DPR RI in upholding democracy and peace through parliamentary diplomacy efforts in the Southeast Asia region.

## Context

In addition to its role in carrying out legislation, budgeting, and oversight functions domestically, the Indonesian House of Representatives (DPR RI) has played a unique role in strengthening inter-parliamentary diplomacy within the Southeast Asia region and beyond. Through the Committee Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP), DPR RI has been key in bridging dialogues between political actors to resolve conflicts and advance cooperation, particularly among parliamentarians.

BKSAP DPR RI has had some successes in highlighting humanitarian agendas of the region in recent years, particularly in response to several crises arising from fellow ASEAN member state, Myanmar. A notable example includes the parliament's efforts to produce an outcome document on the Rohingya humanitarian crisis through multilateral partnerships, such as the Inter-Parliamentary Union (IPU) and the Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF). Most recently, in response to the ongoing political crisis following the military coup in Myanmar, BKSAP DPR RI has also consistently pushed for full implementation of the Five-Point Consensus agreed upon by ASEAN regional leaders in 2021.

At the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 42<sup>nd</sup> General Assembly last year, BKSAP DPR RI proposed a draft resolution to the Committee on Political Matters in response to the Myanmar political and humanitarian crises. Unfortunately, the draft resolution did not pass due to concerns regarding ASEAN's non-interference principle and the issue not being explicitly included as a key priority during the

meeting. Meanwhile, lack of concrete outcome from efforts taken by ASEAN and the United Nations (UN) presented growing concerns for the safety and security of the people of Myanmar.

This February marks one-year anniversary of the military coup in Myanmar. After the military takeover on 1 February 2021, Myanmar was forced into a crisis. Concerns are made by international community to alleviate the suffering of the Myanmar people as well as to ensure that their democratic wishes are respected. Latest reports of the situation on the ground have been deeply concerning. The Assistance Association for Political Prisoners disclosed that death toll since the February 2021 coup has reached 1,500 lives—around 100 of which are children. In August 2021, the Women’s League of Burma also reported additional challenges faced by Myanmar citizens, particularly women, as they navigate lives during a pandemic in the midst of a violent coup and crippling internal conflict. Female health workers are also under attack as they go underground to avoid the military junta government who hunts down medical professionals with any connection to the Civil Disobedience Movement (CDM).

In respect to the ASEAN Charter principles of upholding democracy, human rights, and freedoms, BKSAP DPR RI is pleased to accept the audience request from the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) through the AIPA Secretariat to initiate bilateral communication between Indonesian and Myanmar parliamentarians. Conducted in a P2P Friendly Talk setup, this dialogue, not only reflecting on the past year’s events in Myanmar, will focus on exchanging updates and concerns about the crises as well as explore potential areas of cooperation between members of the two parliaments to improve the situation in Myanmar and discuss relevant key thematic policy areas.

## **Objectives**

The dialogue is aimed at initiating bilateral communication between BKSAP DPR RI and CRPH, particularly in relation to resolving the crises in Myanmar. Objectives of this dialogue are as follows:

- To deepen understanding of BKSAP DPR RI on recent updates relating to the crises in Myanmar
- To explore potential collaboration between BKSAP DPR RI and CRPH.
- To designate focal points from both BKSAP DPR RI and CRPH to lead coordination and follow up on potential collaboration beyond the dialogue.

## **Format**

This event will be divided into two parts:

1. P2P Friendly Talk on 8 February 2022 involving participants from BKSAP DPR RI (in Tangerang) and CRPH (joining virtually). Prior to that, BKSAP DPR RI is expected to hold a preparatory meeting on 7 January. See Annex 1 and Annex 2 for complete list of participants from both BKSAP DPR RI and CRPH.
2. Workshop on 9 February 2022 to devise a strategic plan in anticipation of the incoming international parliamentary fora.



## Agenda

PREPARATORY MEETING   7 FEBRUARY 2022   14.00 - 16.00 WIB
Description
<p><b>Technical Meeting with BKSAP &amp; Secretariat</b></p> <p><i>Discussion on Draft of Outcome Document and other matters concerning the P2P Meeting such as rundown of the meeting, the format, etc.</i></p>

### **Note:**

*Ms. Dewi Amelia Tresna Wijayanti, Expert Staff of the BKSAP DPR RI, will inform the audience when the meeting shall commence and end as well as to offer the sessions to the Moderator*

P2P FRIENDLY TALK
“BKSAP DPR RI and CRPH Bilateral Dialogue: Situational Update on Democracy and Peace in Myanmar”
Tuesday, 8 February 2022   14.00 - 16.00 (GMT+7)
Description
<p><b>Opening Remarks and Introduction</b></p> <p><i>Remarks from Chair of BKSAP DPR RI to welcome all participants. Roll call of all MPs participating in the dialogue by DPR RI.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hon. Dr. Fadli Zon, SS, Msc - Chair, Inter-Parliamentary Cooperation Committee   DPR RI</li></ul> <p>Time allocation: 15 minutes</p>
<p><b>CRPH Introduction, Situation Updates, and Express Intentions</b></p> <p><i>Roll call of all MPs participating in the dialogue by CRPH. The CRPH to share the economic and political instability in Myanmar after the military takeover on 1 February 2021 that forced Myanmar into a crisis. Furthermore, CRPH will also share their concerns around:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>The situation of humanitarian aid and COVID-19 response in Myanmar</i></li><li>2. <i>The establishment and coordination between interim democratic opposition</i></li></ol> <p><i>On top of that, CRPH to express the intentions of the request of the meeting.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt, Chairman of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw   CRPH</li><li>• Hon. Mr. Tin Ko Ko Oo, Secretary of the CRPH International Relations Committee   CRPH</li></ul> <p>Time allocation: 30 minutes</p>

### **Interactive Dialogue**

*The Indonesian Parliament to share their general views on the Myanmar crises and followed by an interactive dialogue on the follow up plan to support CRPH in responding Myanmar's humanitarian and political crisis.*

- Hon. Dr. Mardani Ali Sera, Vice Chair of the House Committee for Inter-Parliamentary Cooperation | DPR RI

Time allocation: 60 minutes

### **Closing Statements**

*Closing statement from Vice Chair of BKSAP DPR RI and Chair of CRPH delegate to close the session.*

- Hon. Dr. Mardani Ali Sera, Vice Chair of the House Committee for Inter-Parliamentary Cooperation | DPR RI
- H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt, Chairman of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw | CRPH

Time allocation: 15 minutes

<b>WORKSHOP</b>	
<b>"Follow Up on the BKSAP DPR RI and CRPH Bilateral Dialogue: Situational Update on Democracy and Peace in Myanmar"</b>	
<b>Wednesday, 9 February 2022   09.00 - 13.00 (GMT+7)</b>	
<b>Time</b>	<b>Description</b>
09.00-09.30	<b>Registration</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zoom meeting open</li><li>• Networking coffee chat</li></ul>
09.30-09.35	<b>Opening by MC</b>
09.35-09.50	<b>Welcome and Opening Remarks</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti - Head of Bureau, BKSAP   DPR RI (TBC)</li><li>• Agus Wijayanto - Country Representative, Indonesia   WFD</li></ul>
09.50-10.00	<b>Setting the Context of Indonesian Parliament's Role in Supporting Myanmar Democracy and Peace</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chaired by Lina Alexandra - Senior Researcher   Centre for Strategic and International Studies (CSIS)</li></ul>

10.00-10.20	<p><b>Parliaments' Role in Strengthening Bilateral Cooperation to Respond Myanmar's Humanitarian Crisis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Charles Santiago MP, Chairman   ASEAN Parliamentarians for Human Rights / Member of Parliament   Malaysia</li> </ul>
10.20-10.40	<p><b>Ensuring the Continuity of Regional Humanitarian Effort in Crisis Situations: A Case of Myanmar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adelina Kamal - Former Executive Director   ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)</li> </ul>
10.40-11.00	<p><b>Indonesian Government and Indonesian Parliaments Joint Effort to Restore Peace and Security in Myanmar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolliansyah Soemirat - Director for ASEAN Political Security Cooperation   Ministry of Foreign Affairs of Indonesia</li> </ul>
11.00-12.00	<b>Q&amp;A Session</b>
12.00-13.00	<b>Closing and Lunch Break</b>
Online Follow Up	<p><b>Consolidating and Finalising Outcome Document</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aji Pratama - Expert Staff, BKSAP   DPR RI</li> <li>• Dewi Amelia Tresna Wijayanti - Expert Staff, BKSAP   DPR RI</li> </ul>

## Annex 1. BKSAP DPR RI Delegates

1	Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Si	F-P-Gerindra/A-86	Ketua BKSAP Anggota Komisi I
2	Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA, MBA	F-PDIP/A-139	Wakil Ketua BKSAP Anggota Komisi XI
3	Putu Supadma Rudana, MBA	F-PD/A-563	Wakil Ketua BKSAP Anggota Komisi VI
4	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng	F-PKS/A-422	Wakil Ketua BKSAP Anggota Komisi II
5	Ir. H. Achmad Hafisz Tohir	F-PAN/A-487	Wakil Ketua BKSAP Anggota Komisi XI
6	dr. Sofyan Tan	F-PDIP/A-137	Anggota BKSAP Anggota Komisi X
7	Drs. H. Darul Siska	F-PG /A-271	Anggota BKSAP Anggota Komisi IX
8	Ir. H. Kamrussamad, ST., M.Si	F-P-Gerindra/A-79	Anggota BKSAP Anggota Komisi XI
9	Ratih Megasari Singkaru, M.Sc	F-PNasdem/A-402	Anggota BKSAP Anggota Komisi XI
10	Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LL.M	F-PDemokrat/A-546	Anggota BKSAP Anggota Komisi XI
11	H. Syahrul Aidi Maazat, LC., MA	F-PKS/A-418	Anggota BKSAP Anggota Komisi V
12	Primus Yustisio, SE., MAP	F-PAN/A-498	Anggota BKSAP Anggota Komisi XI
13	Ema Umiyyatul Chusnah	F-PPP/A-471	Anggota BKSAP Anggota Komisi IV

## **Annex 2. CRPH Delegates**

1. H.E. Mr. Aung Kyi Nyunt, Chairman of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
2. Hon. Mr. Tun Myint, Secretary Member of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
3. Hon. Mr. Nay Myo, Member of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
4. Hon. Ms. Myat Thida Htun, Member of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw & Chair of the International Relations Committee
5. Hon. Mr. Tin Ko Ko Oo, Secretary of the International Relations Committee
6. Hon. Mr. Robert, Member of the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw & Member of the International Relations Committee
7. Hon. Mr. Arkar Myo Htet, Member of the International Relations Committee
8. Hon. Mr. Win Ko Oo, Member of the International Relations Committee
9. Hon. Mr. Phone Kyaw, Member of the International Relations Committee
10. Hon. Dr. A Zin Latt, Member of the International Relations Committee
11. Ms. Rose, Head of Committee Unit
12. Ms. Chili, CRPH Support Group
13. Ms. Hana, IR Committee Manager
14. Mr. Kyaw Kyaw, IR Committee Manager
15. Dr. Nay Myo Naing, Interpreter





## DOKUMENTASI KEGIATAN



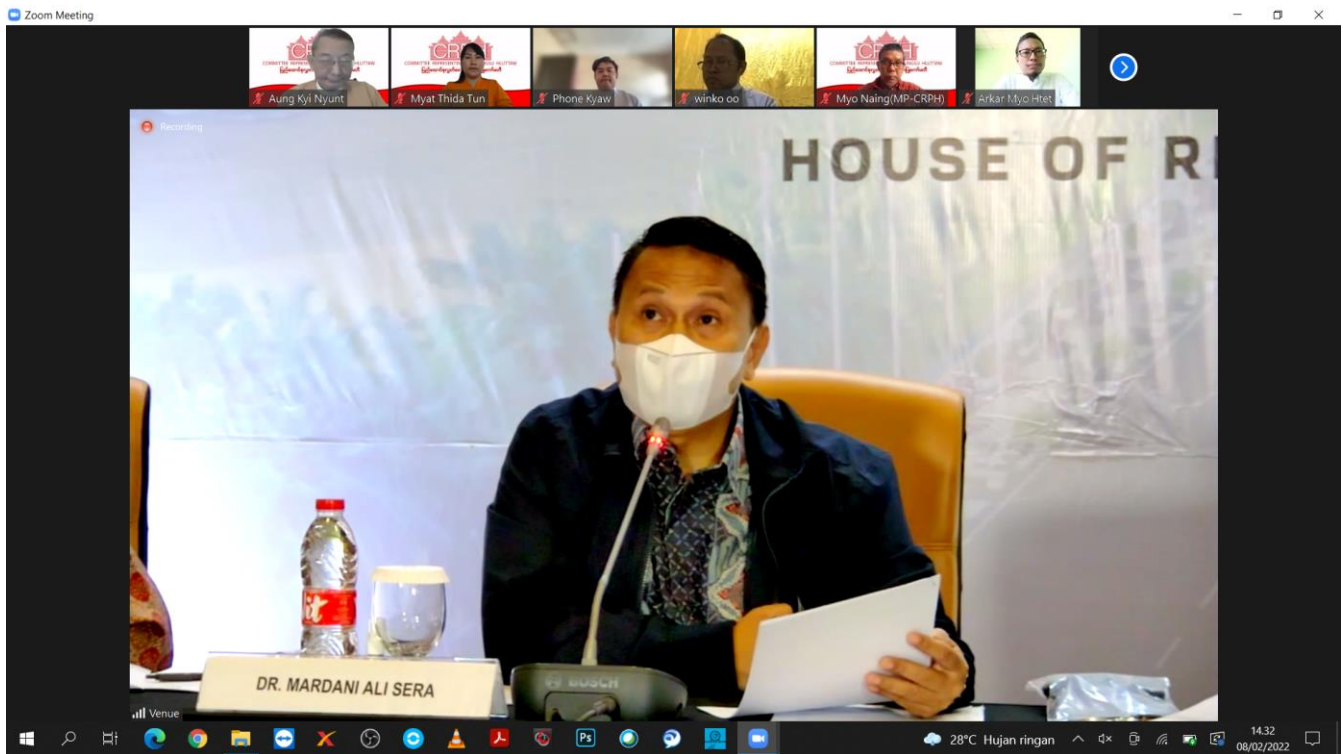
Pimpinan serta Anggota BKSAP sebagai Peserta Kegiatan Diskusi Virtual dengan CRPH



Pimpinan BKSAP dalam Kegiatan Diskusi Virtual dengan CRPH



Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon membuka Kegiatan Diskusi Virtual dengan CRPH



Wakil Ketua BKSAP Dr. Mardani menjadi Moderator dalam Kegiatan Diskusi Virtual dengan CRPH





Wakil Ketua BKSAP Dr. Sihar P.H. Sitorus Berdiskusi dengan Anggota BKSAP lainnya



Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana Memberikan Pernyataan terkait Pengungsi



Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafisz Tohir Menyimak Pernyataan Ketua CRPH



Anggota BKSAP Ratih Megasari Singkarru Memberikan Pernyataan terkait Sikap ASEAN dalam Konflik di Myanmar





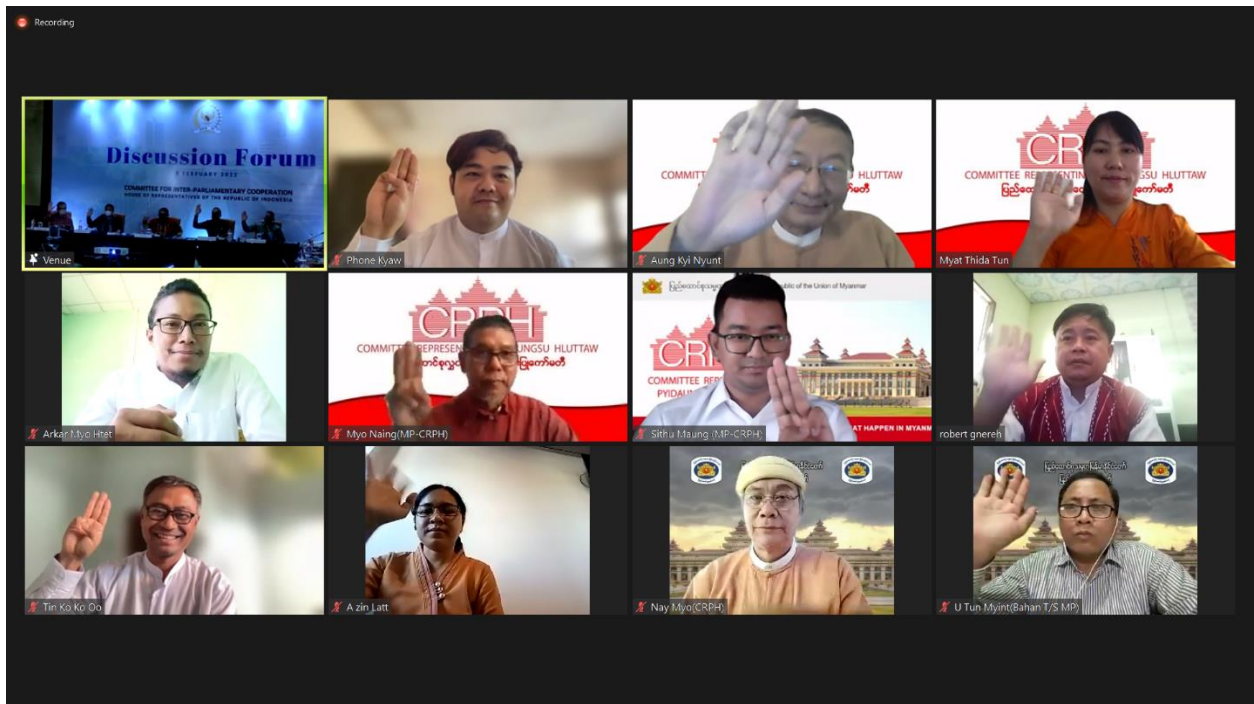
Anggota BKSAP Sofyan Tan dalam Pertemuan dengan CRPH



Anggota BKSAP Darul Siska dan Kamrussamad berdiskusi dalam Diskusi Virtual dengan CRPH



Anggota BKSAP Ema Umiyyatul Chusnah, Primus Yustisio, Didi Irawadi Syamsuddin, Syahrul Aidi Ma'azat dan Ratih Megasari Singkarru Menyimak Pernyataan dari Pimpinan BKSAP



Para Peserta Berpamitan setelah Kegiatan Diskusi Virtual BKSAP dengan CRPH





**Biro Kerja Sama Antar Parlemen  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara III, Lantai 6, Komplek MPR/ DPR/ DPD RI  
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Telp. : 021-5715 294/210

Fax: 021-5715 295

Email : [ksr.bksapdpr@gmail.com](mailto:ksr.bksapdpr@gmail.com)



@bksapdpr



@bksapdpri



BKSAP DPRRI



BKSAP DPRRI



<http://ksap.dpr.go.id>